



DATA PILAH GENDER

KOTA BEKASI 2017

KATA PENGANTAR

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Persoalan penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan tersebut maka sangat dibutuhkan dukungan data dan penganggaran yang berpihak pada kesetaraan gender.

Data terpilah gender merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian wewenang antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang memberikan arahan tentang data apa saja serta sumber data-data tersebut.

Berdasarkan amanat tersebut serta mengingat pentingnya ketersediaan data pilah di Kota Bekasi untuk mendukung pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis dalam skala nasional untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, keluarga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan maupun laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari semua kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Data gender dan anak dapat membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi perbedaan kondisi perkembangan keadaan perempuan dan laki-laki, mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan, mengidentifikasi masalah, membangun dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki. Publikasi buku ini ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum serta masalah sosial. Disamping itu, menyusun analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, kebijakan dan evaluasi program.

Bekasi, Desember 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

Ir. Hj. RISWANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19601119 199203 2 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	5
C. Tujuan Publikasi Data Terpilah.....	6
BAB II PENYUSUNAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK.....	8
A. Data Gender Dalam Teori	8
B. Data Gender dan Kerangka Analisis Gender	12
C. Integrasi Data Gender Dalam Perencanaan Penganggaran	12
D. Metode Penyediaan Data Gender	16
BAB III IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA BEKASI	18
A. Indikator Utama dalam PUG	18
B. Indikator Pembangunan Daerah	28
BAB IV PEMANFAATAN DATA GENDER.....	63
A. Isu-isu Gender Kota Bekasi	63
B. Pemanfaatan Data Gender Dalam <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP).....	63
C. Integrasi Gender Dalam Dokumen Perencanaan	73
D. Penganggaran Responsif Gender.....	79
E. Instrumen Anggaran Responsif Gender.....	84
F. RKA SKPD.....	88
BAB V PENUTUP.....	90

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1.** Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bekasi Tahun 2011-2015
- Tabel 3.2.** Perbandingan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017
- Tabel 3.3.** Perbandingan Indikator Angka Melek Huruf Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015 dan HLS Tahun 2017
- Tabel 3.4.** Perbandingan Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Bekasi dengan Kota Lain dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2017
- Tabel 3.5.** Perbandingan Pengeluaran (Rp/Kapita/Hari) Kota Bekasi dengan Kota Lain dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2015
- Tabel 3.6.** Perbandingan Capaian IDG Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013
- Tabel 3.7.** Perbandingan Capaian Indikator Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013
- Tabel 3.8.** Perbandingan Capaian Perempuan sebagai Tenaga Managerial, Teknisi, dan Administrasi Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2017
- Tabel 3.9.** Perbandingan Capaian Indikator Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016
- Tabel 3.10.** Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA Kota Bekasi Tahun 2013 - 2017
- Tabel 3.11.** Jumlah Guru PAUD di Kota Bekasi Tahun 2017
- Tabel 3.12.** Jumlah Siswa PAUD menurut Jenis, Gender dan Kecamatan Tahun 2017
- Tabel 3.13.** Jumlah Siswa SD menurut Kecamatan dan Status Sekolah Kota Bekasi Tahun 2017
- Tabel 3.14.** Jumlah Siswa SD menurut Status Sekolah Tahun 2012 – 2017
- Tabel 3.15.** Jumlah Guru SD menurut Status Sekolah Tahun 2012 – 2017
- Tabel 3.16.** Jumlah Siswa SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi Tahun 2016 – 2017

- Tabel 3.17.** Jumlah SMP Negeri, Guru dan Siswa SMP Negeri menurut Kecamatan dan Status Sekolah
- Tabel 3.18.** Jumlah Siswa SMA Negeri dan Swasta di Kota Bekasi Tahun 2016 – 2017
- Tabel 3.19.** Jumlah Guru SMA Negeri dan Swasta di Kota Bekasi Tahun 2016 - 2017
- Tabel 3.20.** Cakupan Ibu hamil yang Mendapat Imunisasi Tetanus Toxoid Tahun 2012-2017
- Tabel 3.21.** Ibu Nifas yang Mendapat Vit A berdasarkan Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2017
- Tabel 3.22.** Jumlah Zona Selamat Sekolah
- Tabel 3.23.** Jumlah Ruang Henti Kendaraan (RHK)
- Tabel 3.24.** Jumlah Camat dan Lurah di Kota Bekasi tahun 2017
- Tabel 3.25.** Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2014 -2019
- Tabel 3.26.** Jumlah Penyandang AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2010-2014
- Tabel 3.27.** Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2014 -2019
- Tabel 3.28.** Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Kota Bekasi Tahun 2018
- Tabel 3.29.** Jumlah Jaksa diKejaksaan Negeri Kota Bekasi Tahun 2017
- Tabel 3.30.** Jumlah Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan dan Penempatan Tahun 2017
- Tabel 4.1** Analisis GAP

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 3.1.** Perkembangan Capaian IPG Kota Bekasi Tahun 2010-2017
- Grafik 3.2.** Perbandingan Capaian IPG Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
- Grafik 3.3.** Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bekasi dalam kurun waktu 2010-2017
- Grafik 3.4.** Jumlah Guru PAUD di Kota Bekasi Tahun 2017
- Grafik 3.5.** Jumlah Guru dan Murid SMP Negeri di Kota Bekasi Tahun 2012-2017
- Grafik 3.6.** Jumlah Guru dan Murid SMA Negeri di Kota Bekasi Tahun 2012 – 2016
- Grafik 3.7.** Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita di Kota Bekasi Tahun 2017 Per Kecamatan
- Grafik 3.8.** Jumlah Kematian Ibu di Kota Bekasi Tahun 2015 – 2017
- Grafik 3.9.** Camat di Kota Bekasi tahun 2017
- Grafik 3.10.** Lurah di Kota Bekasi tahun 2017
- Grafik 3.11.** Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Bekasi Tahun 2013-2017
- Grafik 3.12.** Jumlah Panti Asuhan dan Anak Aneh di Kota Bekasi Tahun 2017
- Grafik 3.13.** Jumlah Penyandang Cacat dengan Kategori Tuna Netra, Tuna Rungu dan Cacat Tubuh di Kota Bekasi Tahun 2017
- Grafik 3.14.** Jumlah Penyandang HIV, AIDS dan Syphilis Tahun 2017
- Grafik 3.15.** Jumlah Kasus Narkoba di Kota Bekasi tahun 2017
- Grafik 3.16.** Jumlah Ormas di Kota Bekasi Tahun 2016
- Grafik 3.17.** Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Partai Tahun 2017
- Grafik 3.18.** Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin
- Grafik 3.19.** Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2017
- Grafik 3.20.** Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017
- Grafik 3.21.** Jumlah Penghuni Lapas Kota Bekasi Tahun 2016
- Grafik 3.22.** Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan menurut jenis kelamin dan per kecamatan tahun 2017
- Grafik 3.23.** Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender. Keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai dimensi kehidupan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan

Beragam permasalahan yang dialami perempuan pada masa lalu maupun kini, tentu saja tidak luput dari perhatian komunitas negara-negara di dunia. Perhatian ini sebagai wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan di berbagai hal yang menyangkut perempuan. Dalam berbagai kesempatan kerap perempuan selalu dijadikan objek eksploitasi, serta adanya upaya marginalisasi perempuan. Padahal, bila ditinjau dari konteks kehidupan bermasyarakat perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk diperlakukan secara adil dalam berbagai peran di segala bidang kehidupan. Keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah. Dimulai dari dicetuskannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia); oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya.

Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadilandakan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*). Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995.

Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-negara di dunia, mencakup: perempuan dan kemiskinan; pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan; mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; hak asasi perempuan; perempuan dan media; perempuan dan lingkungan hidup; serta anak perempuan.

Indonesia, sebagai negara anggota PBB pun ikut berpartisipasi dalam konferensi tersebut dan mempunyai kewajiban moral melaksanakan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi tersebut. Kewajiban itu dibebankan kepada berbagai pihak baik Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi non-pemerintah, Kelompok Perempuan, Pelaku Pendidikan, Media Massa, Pihak Swasta dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Secara Internasional, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global PBB pada *Convention on the Elimination of all form of discrimination against women*, dimana berkewajiban untuk menghapus diskriminasi dan pemajuan kesetaraan dan keadilan

gender baik yang bersifat sementara maupun berkesinambungan. Sesuai dengan Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan.

Secara umum tujuan PUG memastikan apakah perempuan dan laki-laki diperlakukan adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi dan memperoleh Manfaat (AKPM) yang sama atas pembangunan. Sejak diberlakukannya Inpres tersebut, implementasi PUG belum berjalan optimal sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Inpres tersebut. Dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan strategi tersebut, Pemerintah mencantulkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu menjadi salah satu arah pembangunan di dalam Misi 2 untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan PUG. Adapun tujuan pelaksanaan PUG adalah agar semua komponen masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, memperoleh akses, partisipasi dan kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta kelompok-kelompok rentan dan termajinalisasi dalam pembangunan.

Implementasi penting dalam PUG adalah perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan kesehatan bagi laki-laki dan perempuan sehingga diharapkan kesenjangan gender dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi. Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, tetapi memastikan bagaimana agar perspektif gender dapat diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran.

Salah satu upaya yang harus segera diimplementasikan adalah penyediaan data. Upaya ini selaras dengan aksi Beijing yaitu aksi ke Mekanisme-mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan khususnya poin 3 yaitu *“menyusun dan menyebarluaskan data yang telah dipilah-pilah menurut gender dan informasi untuk perencanaan dan evaluasi”*.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG). Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk: (i) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, termasuk anak, dalam dimensi tempat dan waktu (ii) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan (iii) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Data gender adalah data yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan, serta disparitasnya, sehingga dapat dirumuskan isu gender. Melalui data gender ini selain dapat dirumuskan isu gender, dapat pula sebagai bahan pengambilan keputusan berkaitan dengan kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak mengamanatkan pentingnya data gender sebagai

dasar pengambilan keputusan penting menyangkut kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat. Penyelenggaraan data gender disini merupakan suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan PUG yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Data terpilah menurut jenis kelamin bermanfaat untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ kemajuan/ perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda. Penggunaan data gender ini adalah untuk melakukan analisis gender, dan menentukan intervensi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.

Tahapan penyusunan data dan informasi meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender.

Tersusunnya data terpilah gender menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam melengkapi 7 prasyarat Pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan diraihnya **“Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama”** yang merupakan keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan implementasinya Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum Pendataan Dan Pengolahan Data Terpilah Gender Dan Anak di Kota Bekasi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

C. Tujuan Publikasi Data Terpilah

Publikasi Data Terpilah Gender ini disusun untuk melihat perkembangan Data Terpilah Gender dan Anak di Kota Bekasi pada tahun 2016 dan 2017 serta memotret tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Penyusunan Data Terpilah Gender merupakan bagian dari konsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) untuk membangun landasan pembangunan yang kuat agar pembangunan dapat terwujud dengan berlandaskan prinsip kesetaraan

dan keadilan gender. Penyusunan statistik gender Kota Bekasi ini dimaksudkan untuk menyajikan fakta dan kondisi pencapaian pembangunan masyarakat berperspektif gender, dan fakta terkait kondisi anak di Kota Bekasi. Data Terpilah Gender diperlukan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi perempuan dan laki-laki pada bidang-bidang utama, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, pertanian, perlindungan perempuan dan anak, serta keluarga berencana. Statistik gender juga diharapkan mampu menggambarkan keunikan isu-isu gender maupun isu-isu perlindungan anak yang khas di Kota Bekasi.

Data Terpilah Gender Kota Bekasi ini disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan sebaran penduduk;
- 2) Tersedianya data terpilah gender di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan anak, dan bidang-bidang yang menjadi isu gender khas di Kota Bekasi;
- 3) Tersedianya hasil analisis tentang capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bekasi. Hal ini dilihat berdasarkan indikator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor publik, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam distribusi pendapatan.
- 4) Meningkatkan aksesibilitas SKPD dalam mengumpulkan, melaporkan data pilah, sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender.

BAB II

PENYUSUNAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

A. Data Gender Dalam Teori

1. Data Pembuka Wawasan

Data pembuka wawasan adalah data yang digunakan untuk menelusuri permasalahan yang terjadi. Dalam data mengandung permasalahan yang dapat dilihat dari perbedaan dari tahun ke tahun, perbedaan gender, wilayah, kondisi antar data bahkan menurut sumbernya. Data menjadi pembuka wawasan dan mendorong seseorang untuk menelusuri lebih jauh hubungan data satu dengan yang lain untuk mengungkapkan persoalan yang terjadi.

Kegunaan data gender ini adalah:

- a. Mengidentifikasi perbedaan
- b. (kondisi/kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda.
- c. Melihat hasil dari intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak.
- d. Sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua yang bekerja untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- e. Sebagai input untuk melakukan analisis gender.
- f. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yg paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki
- g. Sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua yg bekerja untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta) dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat 'bercerita' banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti

manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya.¹

Terdapat 3 kelompok data yaitu data runtun waktu (**time series**), data silang (**cross section**), dan data panel (*pooled data*). Data sangat diperlukan dalam penelitian, maupun pengambilan keputusan. **Time series** merupakan data yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu misalnya harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain. **Data time series** juga sangat berguna bagi pengambil keputusan untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Karena diyakini pola perubahan **data runtun waktu** beberapa periode masa lampau akan kembali terulang pada masa kini. **Data time series** juga biasanya bergantung kepada lag atau selisih.

Data Silang (**cross section**) terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu, misalnya data pada IPG akan terdiri dari lama sekolah, jumlah melek huruf, pendapatan perkapita, dan harapan hidup. Data Panel (**pooled data**) adalah data yang menggabungkan antara data runtun waktu (**time series**) dan data silang (**cross section**). Karena itu **data panel** akan memiliki beberapa objek dan beberapa periode waktu.

Data belum dapat berbunyi jika belum terkumpul dengan baik. Ada beberapa pendekatan dalam pengumpulan data yaitu pendekatan pada proses (*process oriented*). Pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*) dan pemodelan yang berorientasi pada proses (*process oriented modeling*). Untuk mendefinisikan kebutuhan data pada pendekatan ini memiliki langkah-langkah berikut :

- a. Mendefinisikan masalah
- b. Mendefinisikan keputusan yang dibutuhkan
- c. Menjabarkan kebutuhan informasi

¹Fathansyah, *Buku Teks Komputer Basis Data*, Penerbit Informatika, Bandung. Hal 2

- d. Menentukan pemrosesan yang dibutuhkan
- e. Menentukan spesifikasi kebutuhan data

Data tidak dapat dibaca sebelum diolah. Proses pengolahan itulah yang disebut dengan informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi merupakan nilai yang telah memiliki makna bagi seseorang.

Dalam perspektif gender, data pembuka wawasan memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti. Untuk menyusun perencanaan responsif gender, ketersediaan data merupakan syarat utama guna melakukan analisis situasi gender. Data yang dibutuhkan adalah data yang menunjukkan kondisi adanya kesenjangan gender.²Data pembuka wawasan merupakan data atau informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi/kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda; melihat hasil intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat; serta dampak dari suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesenjangan gender.

Data pembuka wawasan dapat berupa: (1) data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan, dan (2) data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita, dan angka kematian ibu.

² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak

2. Jenis Data Pembuka Wawasan

a. Data Terpilah

Data terpilah adalah : (1) data kuantitatif dan data kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan; (2) dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya : angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya; (3) merupakan data tentang status, peran dan kondisi laki-laki dan perempuan; (4) digunakan untuk melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan; dan (5) data dapat dipilah menurut berbagai karakteristik atau ciri.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak, yang dimaksud dengan data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

b. Data Berdasarkan Insiden Khusus

Data berdasarkan insiden khusus adalah : (1) data dari sebuah kejadian yang bisa dialami oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan. Contoh : temuan penelitian tentang endemik kanker leher rahim di daerah terdampak; (2) data kesenjangan spesifik yang menimpa kelompok rentan. Contoh : Jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin; dan (3) data kualitatif yang menggambarkan akibat kesenjangan relasi laki-laki ataupun perempuan. Contoh : jumlah kasus HIV/AIDS ibu dan anak.

B. Data Gender dan Kerangka Analisis Gender

Terdapat lima jenis analisis gender yaitu : (1) model Harvard, (2) Model Moser, (3) Analisis SWOT, (4) Gender Analysis Pathway (GAP) dan Model Problem Based Approach (PROBA). Kelima model analisis ini basisnya adalah data gender. Dalam Model Harvard dan Moser, penggunaan data gender berbasis keluarga dengan eksplorasi pada data kegiatan produktif, reproduktif, sosial, keagamaan dan bahkan hingga kegiatan politik. Informasi yang akan disajikan berupa gambaran kesenjangan keluarga dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Penggunaan analisis SWOT dalam analisis kesenjangan gender adalah pemanfaatan data gender untuk mengeksplorasi kondisi internal dan eksternal dari suatu sumberdaya yang ada. Misalnya data kemiskinan dianalisis dengan perspektif SWOT untuk digali tentang kelebihan dan kekurangan orang miskin, peluang dan tantangan yang terjadi sehingga dapat dihasilkan intervensi program dan kegiatan yang selaras.

Dalam Gender Analysis Pathway (GAP) maupun Problem Based Approach (PROBA), diperlukan data dan informasi yang dapat menggambarkan adanya situasi dan kondisi berkaitan dengan faktor-faktor kesenjangan, meliputi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan bagi perencana menetapkan rencana aksi sesuai dengan kondisi yang ada. Melalui klasifikasi ini perencana akan mampu menjaga konsistensi antara data yang tersedia, isu gender hingga sampai ke penetapan rencana aksi.

C. Integrasi Data Gender Dalam Perencanaan Penganggaran

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan dasar dari

sinkronisasi siklus perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah tidak terpisah dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1.

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PPRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan

Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia di mana pengelolaan anggaran

memperhitungkan komponen gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan indikator keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak pasal 1 mengungkapkan bahwa penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, serta berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.³

Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0 – 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.⁴

Beberapa jenis data yang diatur dalam peraturan ini selain data terpilah, juga data anak. Data terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang berfungsi secara efektif

³NSPK Data Gender dan Anak, 2009

⁴opcit, 2009

dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan. Selain itu terdapat data lain yaitu data sektoral dan data khusus.

Data sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Data Khusus adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial-budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.⁵

Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. Dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

⁵Opcit, 2009

- c. Dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. Relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/ kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

F. Metode Penyediaan Data Gender

1. Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder didasarkan pada instrumen check list yang akan dimintakan kepada Perangkat Daerah (PD) pengampu. Data sekunder diolah dan dintepretasikan sehingga dapat memberikan informasi akurat dalam pengambilan keputusan. Data sekunder ini diperkuat dengan diperoleh melalui desk Perangkat Daerah (PD) khususnya menentukan isu gender dari hasil olahan data sekunder serta informasi berkaitan program dan kegiatan yang relevan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan pengelompokan data sesuai variabel yang disusun, dan dirumuskan berdasarkan tahun. Data yang telah terkompilasi selanjutnya ditabulasikan atau disusun dalam bentuk grafik sehingga memudahkan untuk dibaca.

3. Analisis Data

Analisis data sekunder merupakan analisis data survei yang telah tersedia. Analisis ini mencakup interpretasi, kesimpulan atau tambahan pengetahuan dalam bentuk lain. Dari data sekunder didapat dua manfaat yang menyertainya. Analisis sekunder dapat menjadi alternatif untuk mendapat jawaban yang tidak didapat dari

penelitian primer. Analisis data sekunder bermanfaat sebagai alat komparasi dengan data yang telah ada untuk mencari perbedaan dengan temuan yang baru.

Analisis lain yang digunakan adalah analisis gender. Analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, dimana laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena sistem ketidakadilan gender tersebut. Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender (*practical gender needs*). Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali hasilnya. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.⁶ Pada dokumen ini Analisis Gender digunakan untuk menganalisis data gender yang akan menghasilkan isu gender. Isu gender inilah yang akan di gunakan sebagai bahan perencanaan penganggaran.

⁶Permendagri 67 tahun 2011

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER

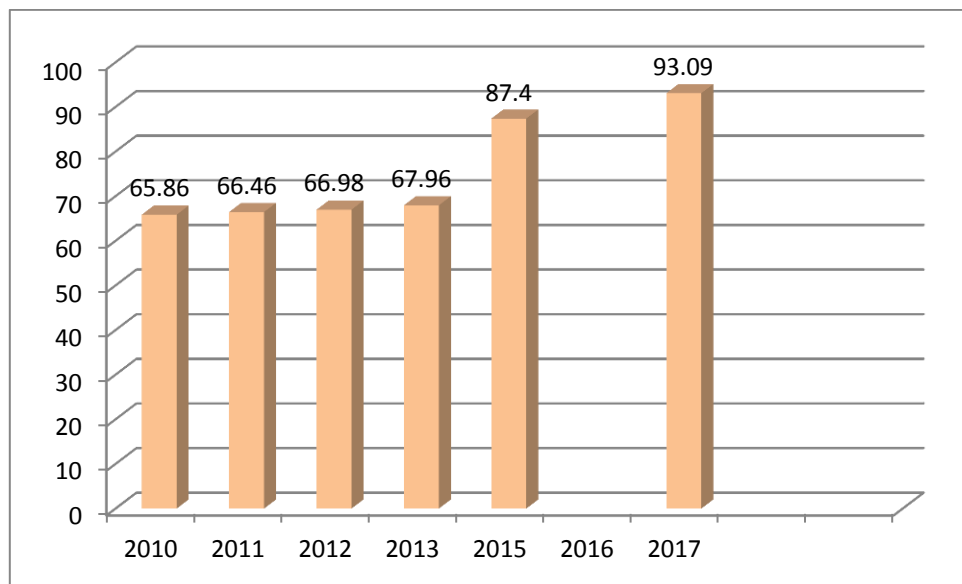
KOTA BEKASI

A. Indikator Utama dalam PUG

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Perkembangan capaian IPG Kota Bekasi pada kurun waktu 2010-2013 dan Tahun 2015 menunjukkan tren yang positif karena capaiannya selalu meningkat. Perkembangan capaian IPG Tahun 2010-2013 dan Tahun 2015 Kota Bekasi dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini:

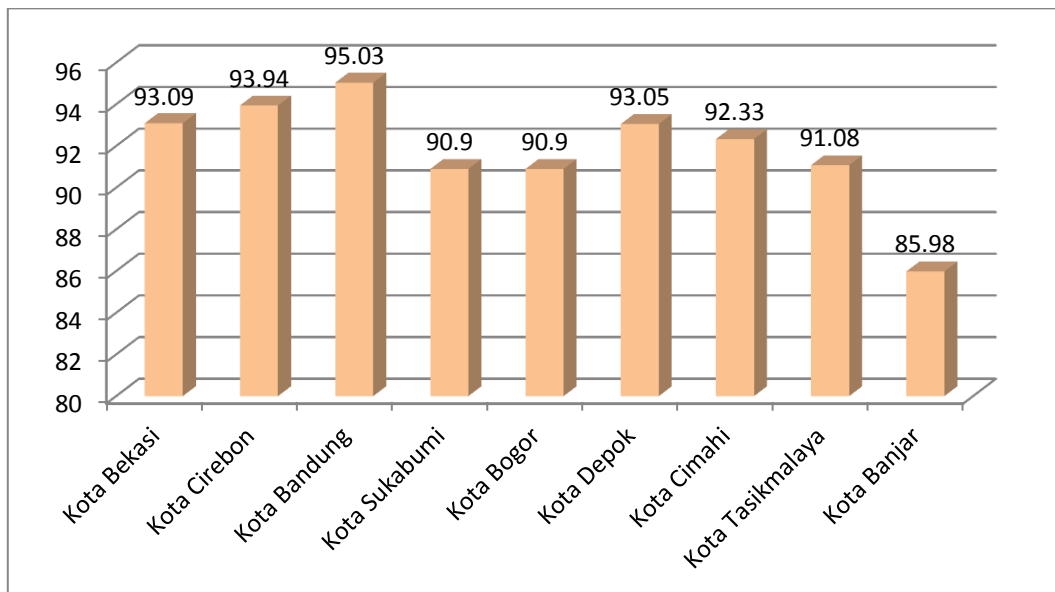


Grafik 3.1.

Perkembangan Capaian IPG Kota Bekasi Tahun 2010-2017

Sumber: *Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014 dan Tahun 2016 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*

Capaian IPG Kota Bekasi pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan kota lain di Provinsi Jawa Barat masih belum begitu baik. Dari 9 kota yang ada di Jawa Barat, Kota Bekasi posisinya hanya di atas Kota Banjar dan Kota Sukabumi. Meskipun demikian capaian Kota Bekasi pada Tahun 2015 sudah mencapai 92,99 sudah berada di atas-rata capaian Provinsi Jawa Barat 89,11. Perbandingan capaian IPG Kota Bekasi dengan kota-kota lain dan capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 dapat dilihat dalam grafik berikut :



Grafik 3.2.

Perbandingan Capaian IPG Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*

Indikator pembentuk IPG pada dasarnya sama dengan indikator komposit IPM. Perbedaan yang melandasi diantara keduanya adalah, dalam penghitungan capaiannya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian ini dilakukan dalam rangka mengetahui

ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. IPG memiliki 3 indikator yaitu; indikator pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Pada bidang pendidikan terdapat indikator melek huruf, akses pendidikan dasar, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Pada bidang kesehatan terdapat angka harapan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sedangkan pada bidang ekonomi kita bisa melihat dari pendapatan, daya beli, lapangan pekerjaan, status pekerjaan dan jenis pekerjaan.

Tabel 3.1.
Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Bekasi Tahun 2011-2017

Tahun	AHH		EYS		MYS		Pengeluaran		IPM		IPG
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
2011	67,72	71.67	12.69	12.05	10.92	9.94	19,660	12,830	81.75	75.29	92.10
2012	67,78	71,73	12.70	12.21	10.95	9.96	19,940	13,472	81.94	75.98	92.72
2013	68,13	72.07	13.48	12.61	10.98	9.98	20,081	14,146	82.86	76.90	92.81
2014	72.12	76,11	13.63	13.03	11.07	10.01	20,494	14,245	83.32	77.44	92.94
2015	72.42	76,41	13.69	13.14	11.51	10.44	20,574	14,247	84.12	78.22	92.99
2016	<i>Not Available</i>										
2017	72.73	76.50	13.77	13.48	11.76	10.62	20.953	14.430	84.82	78.23	93.09

Sumber data : *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016 dan Badan Pusat Statistik Kota Bekasi Tahun 2017*

Angka Harapan Hidup di Kota Bekasi masih terlihat lebih tinggi perempuan dibanding dengan laki-laki. Pada tahun 2017 Angka Harapan Hidup laki-laki sebesar 72,73 tahun dan perempuan sebesar 76,50 tahun. Perkembangan Angka Harapan Hidup berdasarkan jenis kelamin di Kota Bekasi dalam tiga tahun terakhir terlihat tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Rata-rata Angka Usia Harapan Hidup di Kota Bekasi sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Harapan Hidup laki-laki

dan perempuan Provinsi Jawa Barat. Indikator Angka Harapan Hidup berdasarkan jenis kelamin dan perbandingannya dengan kota lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup
Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

Kota	Angka Harapan Hidup									
	2013		2014		2015		2016 (na)		2017	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kota Bekasi	68,13	72,1	72,12	76,11	72,42	76,41			72,73	76,50
Kota Bogor	67,22	71,2	70,56	74,49	70,86	74,79			71,6	74,86
Kota Sukabumi	68,33	72,3	69,75	73,66	69,85	73,76			69,96	73,82
Kota Bandung	68,1	72	71,76	75,73	71,78	75,75			71,93	75,79
Kota Cirebon	67,01	71	69,76	73,66	69,78	73,68			69,87	73,74
Kota Depok	71,71	75,5	71,91	75,89	71,93	75,99			72,12	76,03
Kota Cimahi	67,79	71,7	71,52	75,48	71,54	75,50			71,67	75,51
Kota Tasikmalaya	68,78	72,7	68,97	72,85	69,27	73,15			69,48	73,36
Kota Banjar	64,88	68,8	68,26	72,12	68,27	72,18			68,37	72,30
Provinsi Jawa Barat	67,07	71	70,36	74,18	70,54	74,36			70,58	74,42

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Kondisi penduduk yang telah melek huruf di Kota Bekasi pada tahun 2017 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sebesar 99,13%, dengan kata lain masih ada 0,87% penduduk Kota Bekasi yang berusia di atas 15 tahun yang masih dalam kondisi buta huruf.

Apabila dirinci dari jenis kelamin, AMH penduduk berjenis kelamin laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan AMH penduduk perempuan. AMH penduduk laki-laki pada tahun 2017 sebesar 99,85%, sedangkan AMH penduduk perempuan sebesar 98,4%.

Perbandingan capaian angka melek huruf Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin dengan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Barat secara lengkap dapat dilihat hat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Perbandingan Indikator Angka Melek Huruf
Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011-2015 dan HLS Tahun 2017

Kota	Angka Melek Huruf / Harapan Lama Sekolah												
	2011		2012		2013		2014		2015 (HLS)		2016 (na)	2017	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P
Kota Bekasi	99,83	98,4	99,83	98,4	99,85	98,4	13,63	13,03	13,14	13,14		13,77	13,98
Kota Bogor	99,16	98,1	99,48	98,5	99,48	98,5	12,09	12,42	12,15	12,71		13,13	13,41
Kota Sukabumi	99,93	99,4	99,96	99,4	99,97	99,4	14,25	12,84	14,28	12,85		14,30	13,15
Kota Bandung	99,96	99,6	99,97	99,7	99,98	99,7	13,36	13,17	13,45	13,67		13,81	14,17
Kota Cirebon	99,54	97	99,73	97,2	99,74	98	12,71	12,95	12,74	13,10		12,76	13,37
Kota Depok	99,84	98,5	99,87	98,5	99,88	98,5	13,41	13,24	13,44	3,72		13,77	13,48
Kota Cimahi	99,95	99,7	99,98	99,7	99,99	99,8	14,15	13,42	13,5	10,95		14,19	13,64
Kota Tasikmalaya	99,85	99,3	99,89	99,7	99,91	99,7	13,29	13,38	13,33	13,39		13,35	13,70
Kota Banjar	98,67	96,2	98,69	96,2	99,87	98,1	12,73	12,27	13,04	12,73		13,49	12,88
Provinsi Jawa Barat	98,03	94,6	98,08	94,7	98,39	95,3	12,13	12,03	12,14	12,34		12,41	12,51

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2013 dan 2016 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2017 telah mencapai 10,62 untuk perempuan dan 11,76 bagi laki-laki. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut maka dapat diartikan bahwa penduduk Kota Bekasi usia 15 tahun ke atas pada tahun 2017 rata-rata telah mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SMA/SMK/MA.

Apabila dipilah menurut jenis kelamin maka angka rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan masih menunjukkan adanya

ketimpangan. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas laki-laki mencapai 11,76 tahun, sedangkan untuk perempuan baru mencapai 10,62 tahun.

Capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin dan perbandingannya dengan kota yang lain serta Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah
Kota Bekasi dengan Kota Lain dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011-2017

Kota	Rata-Rata Lama Sekolah													
	2011		2012		2013		2014		2015		2016 (na)	2017		
	L	P	L	P	L	p	L	P	L	P		L	P	
Kota Bekasi	11,22	10,2	11,34	10,3	11,34	10,3	11,07	10,01	11,51	10,44		11,76	10,62	
Kota Bogor	10,94	8,98	10,94	9,37	10,95	9,38	10,61	9,38	10,63	9,51		10,68	9,89	
Kota Sukabumi	9,89	9,32	9,89	9,32	9,9	9,33	9,25	8,15	9,64	8,50		10,06	8,98	
Kota Bandung	10,84	10,1	10,89	10,3	10,89	10,4	10,84	10,17	10,86	10,19		10,90	10,27	
Kota Cirebon	10,81	9,29	11,01	9,49	11,02	9,5	10,08	9,01	10,24	9,28		10,42	9,30	
Kota Depok	11,9	10,5	11,9	10,6	11,9	10,6	11,25	10,15	11,27	0,16		11,30	10,38	
Kota Cimahi	11,16	10,3	11,16	10,3	11,18	10,4	10,93	10,37	10,95	10,39		11,01	10,61	
Kota Tasikmalaya	9,33	8,44	9,34	8,6	9,34	8,61	8,85	7,97	8,95	8,18		9,43	8,64	
Kota Banjar	8,67	7,79	8,67	7,79	8,69	7,83	8,36	7,20	8,56	7,59		8,83	8,16	
Provinsi Jawa Barat	8,42	7,64	8,44	7,65	8,45	7,69	8,21	7,20	8,36	7,35		8,59	7,69	

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014, 2015 serta Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Indikator Perbandingan Pengeluaran (Rp/Kapita/Hari) Kota Bekasi dengan kota lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan Pengeluaran (Rp/Kapita/Hari)
Kota Bekasi dengan Kota Lain dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014-2017

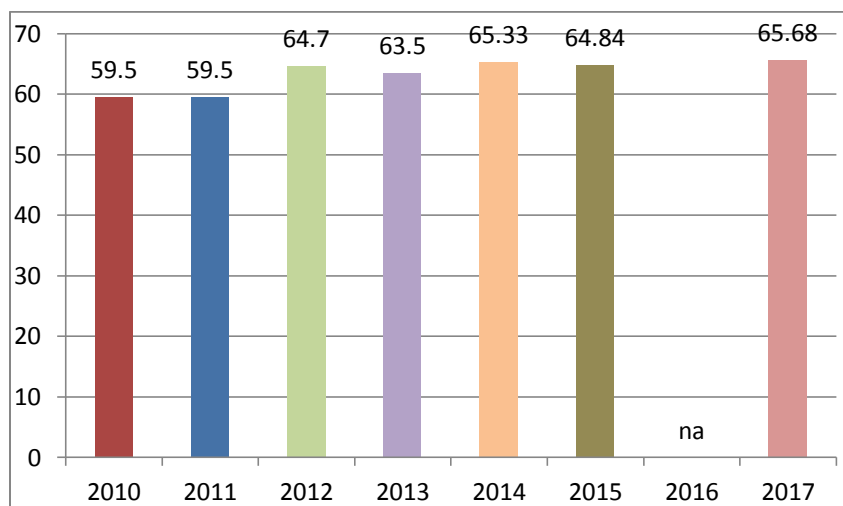
Kota	Pengeluaran (Rp/Kapita/Hari)							
	2014		2015		2016 (na)		2017	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kota Bekasi	20,494	14,245	20,574	14,247			20,95	14,43
Kota Bogor	15,748	8,836	15,865	8,884			16,31	9,05
Kota Sukabumi	13,583	9,210	13,616	9,339			14,15	9,46
Kota Bandung	20,743	14,945	20,847	15,049			21,35	15,24
Kota Cirebon	14,527	10,112	14,628	10,317			15,03	10,66
Kota Depok	20,999	12,848	21,017	12,902			21,23	13,44
Kota Cimahi	14,888	9,677	14,950	9,735			15,42	9,85
Kota Tasikmalaya	11,598	6,816	11,635	6,987			12,42	7,34
Kota Banjar	14,759	6,488	14,827	6,499			15,14	6,95
Provinsi Jawa Barat	13,821	7,181	13,830	7,343			14,49	7,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG atau juga disebut Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang bertujuan untuk mengukur kemajuan perempuan terutama partisipasi dalam forum-forum politik dan ekonomi. IDG menganalisa sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam dunia politik dan ekonomi serta bagian dalam pengambilan keputusan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bekasi dalam kurun waktu 2011-2017 menunjukkan capaian yang fluktuatif dengan tren meningkat. Perkembangan IDG Kota Bekasi secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini:



Grafik 3.3.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bekasi dalam kurun waktu 2010-2017

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*

Adapun capaian indikator pembentuk IDG di Kota Bekasi trennya juga mengalami peningkatan. Semua capaian indikator pembentuk IDG nilainya naik setiap tahunnya kecuali indikator keterlibatan perempuan di parlemen yang kondisinya fluktuatif.

Jika dibandingkan dengan capaian kota lainnya di Jawa Barat, capaian IDG Kota Bekasi tahun 2017 hanya lebih rendah dari capaian Kota Depok, Cirebon dan Cimahi. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Jawa Barat, capaian Kota Bekasi masih berada di bawahnya karena capaian Provinsi Jawa Barat adalah 70,4 sedangkan Kota Bekasi baru 63,50. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bekasi dibandingkan dengan capaian IDG kota se Jawa Barat dari tahun 2010 – 2017 secara lengkap sebagai berikut.

Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian IDG Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (na)	2017
Kota Bekasi	59,19	59,5	64,7	63,5	65,33	64,84		65,68
Kota Bogor	62,6	64,8	66,1	65,02	63,07	64,05		67,37
Kota Sukabumi	52,65	53,6	52,3	58,6	62,35	59,42		60,20

Kota Bandung	64,53	65,8	67,8	68,06	58,22	58,06	58,84
Kota Cirebon	53,28	52,4	52,3	60,27	71,97	74,89	74,23
Kota Depok	77,29	76,4	79,6	79,34	81,08	81,23	81,40
Kota Cimahi	66,15	66,5	69,3	53,1	72,70	73,38	76,97
Kota Tasikmalaya	54,97	50,6	55,2	54,04	54,28	62,46	63,50
Kota Banjar	53,85	55,8	51,7	48,95	47,90	49,32	47,96
Provinsi Jawa Barat	67,01	68,1	68,3	67,57	68,87	69,02	70,4

Sumber: *Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014 dan 2016*

Indikator pertama dari pembentuk IDG adalah Keterlibatan Perempuan di Parlemen. Capaian indikator ini di Kota Bekasi kondisinya fluktuatif, sempat naik pada tahun 2012 namun turun lagi pada tahun 2013. Perbandingannya dengan kota lain dan Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.
Perbandingan Capaian Indikator Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013

Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (na)	2017
Kota Bekasi	14	18,75	16	16,00	16,00		16,00
Kota Bogor	17,78	17,78	17,78	15,56	15,56		17,78
Kota Sukabumi	10	10	13,33	14,29	14,29		14,29
Kota Bandung	18	18	18	6,00	6,00		6,00
Kota Cirebon	6,9	6,67	11,54	25,71	25,71		23,53
Kota Depok	34	38	34	38,00	38,00		38,00
Kota Cimahi	20	22,22	5	26,09	26,07		31,11
Kota Tasikmalaya	6,67	6,67	4,44	4,44	11,11		11,11
Kota Banjar	12	8	8	4,00	4,00		4,00
Provinsi Jawa Barat	24	24	22	22,00	22,00		22,00

Sumber: *Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014 dan 2016*

Indikator kedua adalah Perempuan sebagai Tenaga Manajerial, Teknisi dan Administrasi. Capaian indikator ini mengalami tren yang positif karena nilainya selalu naik dari tahun ke tahun. Perbandingan

capaian indikator ini dengan capaian kota lain dan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Perbandingan Capaian Perempuan sebagai Tenaga Managerial, Teknisi, dan Administrasi Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2017

Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (na)	2017
Kota Bekasi	38,21	39,7	42,2	44,62	42,62		43,69
Kota Bogor	37,98	40,8	35,8	35,61	38,06		41,01
Kota Sukabumi	39,91	33,6	40,7	44,08	34,48		34,79
Kota Bandung	36,92	39,8	39,1	43,30	43,13		45,06
Kota Cirebon	33,12	32,4	37,7	35,41	48,55		48,74
Kota Depok	35,32	40	43,5	45,32	45,15		44,17
Kota Cimahi	44,25	43	44,9	45,55	45,94		49,32
Kota Tasikmalaya	28,99	40,2	45,6	39,20	42,28		48,56
Kota Banjar	43,32	43,8	33	39,95	50,58		37,38
Provinsi Jawa Barat	38,19	38,8	38,4	40,22	40,00		41,60

Sumber: *Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2015 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*

Indikator terakhir adalah Sumbangan Pendapatan Perempuan. Tren capaian indikator ini di Kota Bekasi juga bagus karena meningkat dari tahun ke tahun. Perbandingan dengan kota lain dan Provinsi Jawa Barat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Perbandingan Capaian Indikator Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016

Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (na)	2017
Kota Bekasi	26,93	26,9	27,4	27,86	28,73		29,05
Kota Bogor	28,47	28,5	28,7	28,98	28,94		29,32
Kota Sukabumi	25,74	25,2	25,8	26,31	27,48		27,87
Kota Bandung	31,88	31,9	32,2	32,54	33,90		33,93
Kota Cirebon	30,01	30	30,6	31,11	31,14		31,87
Kota Depok	30,82	31,1	31,5	31,92	31,70		31,99
Kota Cimahi	30,93	29	29,2	29,43	29,30		29,82
Kota Tasikmalaya	30,6	31,2	31,8	32,27	33,37		33,38

Kota Banjar	24,21	25,3	25,7	26,09	26,72	37,38
Provinsi Jawa Barat	27,38	27,7	28,1	28,41	29,03	29,45

Sumber: *Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2016 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*

B. Indikator Pembangunan Daerah

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar untuk pembangunan daerah. Kualitas pendidikan yang baik akan berdampak pada kemajuan suatu daerah demikian juga sebaliknya jika pendidikan berkualitas buruk, bisa dipastikan bahwa daerah tersebut memiliki daya saing rendah dengan daerah lain.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah perlu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Peningkatan dan penyetaraan kualitas pendidikan akan dapat dicapai apabila laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses yang baik dalam bidang pendidikan.

Angka partisipasi kasar (APK) adalah persentase penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur penduduk. Indikator ini dapat memperlihatkan adanya penduduk yang terlalu cepat bersekolah atau terlambat memasuki jenjang pendidikan tertentu. Fenomena ini dapat diakibatkan oleh besarnya antusiasme orang tua untuk menyekolahkan anaknya atau rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sesuai dengan umur anak-anak. Selain

itu, juga dapat menunjukkan bahwa suatu wilayah mampu menampung penduduk umur sekolah melebihi target yang sesungguhnya jika nilai APK melebihi 100 persen.

Tabel 3.10.
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA Kota Bekasi Tahun 2013 - 2017

Jenis Sekolah	Tahun Ajaran					
	2013	2014	2015	2016	2017	
SD	Angka Partisipasi Murni	99,99	99,9	99,03	99,60	105,46
	Angka Partisipasi Kasar	121,80	121,65	99,21	113,27	120,77
SMP	Angka Partisipasi Murni	90,38	83,88	71,46	91,14	84,09
	Angka Partisipasi Kasar	91,75	88,10	72,18	92,70	103,68
SMA	Angka Partisipasi Murni	56,57	62,52	65,12	65,37	67,89
	Angka Partisipasi Kasar	79,61	80,76	84,45	91,01	92,57

Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2017*

a. Jumlah Guru PAUD

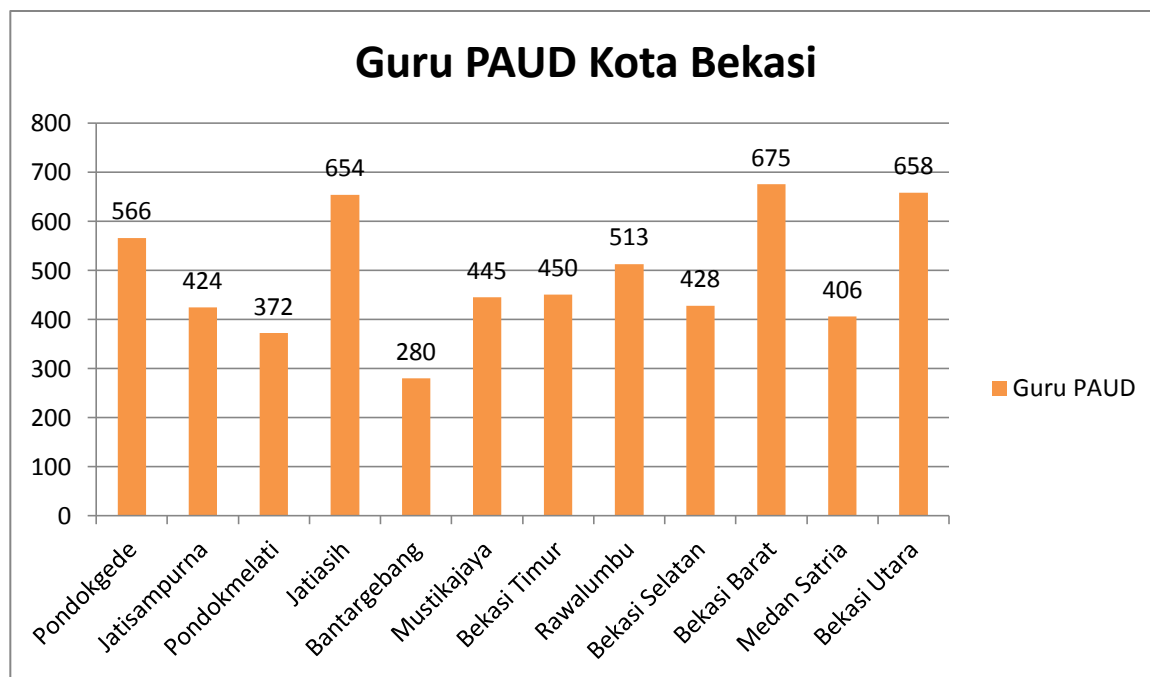
Salah satu faktor penunjang dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah ketersediaan guru. Guru dan kurikulum adalah komponen penting dalam sebuah sistem pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut.

Jumlah guru yang tersedia pada jenjang pendidikan PAUD di Kota Bekasi tahun 2017 mengalami perkembangan yang cukup baik.

Tabel 3.11.
Jumlah Guru PAUD di Kota Bekasi Tahun 2017

No	Kecamatan	JUMLAH GURU PAUD PER - GENDER								JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		TK		KB		TPA		SPS		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	PONDOKGEDE	16	412	1	48	0	0	0	89	17	549	566
2	JATISAMPURNA	44	278	8	77	0	0	4	13	56	368	424
3	PONDOKMELATI	7	258	0	11	0	0	9	87	16	356	372
4	JATIASIH	17	411	4	54	0	13	6	149	27	627	654
5	BANTARGEBAANG	18	111	18	88	0	0	4	41	40	240	280
6	MUSTIKAJAYA	8	344	2	47	0	9	3	32	13	432	445
7	BEKASI TIMUR	5	336	2	49	0	0	1	57	8	442	450
8	RAWALUMBU	5	338	4	59	0	0	8	99	17	496	513
9	BEKASI SELATAN	9	315	4	68	0	0	1	31	14	414	428
10	BEKASI BARAT	13	389	5	132	0	0	1	135	19	656	675
11	MEDAN SATRIA	19	258	4	73	0	0	4	48	27	379	406
12	BEKASI UTARA	18	454	8	95	1	18	2	62	29	629	658
	JUMLAH	179	3,904	60	801	1	40	43	843	283	5,588	5,871

Sumber : Bidang PNFI dan PAUD 2017



Grafik 3.4.
Jumlah Guru PAUD di Kota Bekasi Tahun 2017

b. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Jumlah peserta pendidikan PAUD di Kota Bekasi selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 10.833 orang, terbagi atas 5.346 laki-laki dan 5.487 perempuan. Tahun 2016 Jumlah Siswa PAUD Se-Kota Bekasi Tahun 2016 terdiri dari siswa laki-laki 20,295 orang dan siswa perempuan sebanyak 19,355 orang, dan pada Tahun 2017 terbagi atas 24.138 laki-laki dan 22.721 perempuan.

Sedangkan untuk Siswa Taman Kanak-Kanak adalah pada Tahun 2015 sejumlah 18.385, pada tahun 2016 jumlah siswa perempuan sebanyak 13.951 dan siswa laki-laki sebanyak 14.756. Untuk Tahun 2017 data PAUD digabung menjadi satu terdiri dari Taman kanak-Kanak, Kelompok Belajar, Tempat Pendidikan Anak dan Satuan PAUD Sejenis dengan jumlah murid laki-laki 24.138 dan perempuan 22.721. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Jumlah Siswa PAUD menurut Jenis, Gender dan Kecamatan
Tahun 2017

No	Kecamatan	JUMLAH SISWA PAUD PER - GENDER								JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		TK		KB		TPA		SPS		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1	PONDOKGEDE	1,841	1,760	131	108	0	0	360	288	2,332	2,156	4,488
2	JATISAMPURNA	1,159	1,065	185	176	0	0	29	38	1,373	1,279	2,652
3	PONDOKMELATI	984	967	19	22	0	0	245	245	1,248	1,234	2,482
4	JATIASIH	1,603	1,487	195	212	11	15	469	425	2,278	2,139	4,417
5	BANTARGEBAH	548	523	418	407	0	0	191	166	1,157	1,096	2,253
6	MUSTIKAJAYA	1,777	1,715	235	232	48	35	152	153	2,212	2,135	4,347
7	BEKASI TIMUR	1,509	1,460	290	269	0	0	578	590	2,377	2,319	4,696
8	RAWALUMBU	1,592	1,486	281	218	0	0	399	376	2,272	2,080	4,352
9	BEKASI SELATAN	1,283	1,135	199	200	0	0	225	229	1,707	1,564	3,271
10	BEKASI BARAT	1,470	1,431	492	454	0	0	446	411	2,408	2,296	4,704
11	MEDAN SATRIA	1,237	1,127	300	266	0	0	301	276	1,838	1,669	3,507
12	BEKASI UTARA	2,080	1,905	533	543	45	40	278	266	2,936	2,754	5,690
	JUMLAH	17,083	16,061	3,278	3,107	104	90	3,673	3,463	24,138	22,721	46,859

Sumber : Bidang PAUD DIKMAS 2017

c. Jumlah Siswa Sekolah Dasar dan Swasta di Kota Bekasi

Jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri dari tingkatan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama di Kota Bekasi dilaksanakan oleh Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta, berikut ini disajikan data jumlah siswa Sekolah Negeri maupun Swasta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Jumlah Siswa SD menurut Kecamatan dan Status Sekolah
Kota Bekasi Tahun 2017

Kecamatan	Negeri		Swasta		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P
Pondokgede	9.232	8.861	2.679	2.472	11.911	11.333
Jatisampurna	3.888	3.680	1.855	1.638	5.743	5.318
Pondokmelati	5.115	4.727	1.841	1.709	6.956	6.436
Jatiasih	8.573	8.319	3.171	2.928	11.744	11.247
Bantargebah	4.341	4.115	1.438	1.317	5.779	5.432
Mustikajaya	8.611	8.090	3.420	3.047	12.031	11.137
Bekasi Timur	12.168	11.549	4.617	4.234	16.785	15.783
Rawalumbu	8.063	7.608	4.744	4.520	12.807	12.128

Bekasi Selatan	6.640	6.328	3.019	2.821	9.659	9.149
Bekasi Barat	10.174	9.781	2.999	2.692	13.173	12.473
Medansatria	4.361	3.969	3.633	3.359	7.994	7.328
Bekasi Utara	11.906	11.053	5.352	5.063	17.258	16.116

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2017

Tabel 3.14.
Jumlah Siswa SD menurut Status Sekolah Tahun 2012 - 2017

Tahun	Negeri		Swasta		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P
2012	98.204	92.967	32.364	30.002	131.840	122.969
2013	98.197	93.356	33.507	30.789	131.106	124.145
2014	97.023	91.396	34.256	31.023	131.279	122.419
2015	98.147	90.382	36.487	33.536	132.487	123.918
2016	93.796	89.149	37.310	34.381	131.106	123.530
2017	93.072	88.080	38.768	35.800	131.840	123.880

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2017

Tabel 3.15.
Jumlah Guru SD menurut Status Sekolah Tahun 2012 - 2017

Tahun	Negeri		Swasta		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P
2012	1.563	3.270	2.249	4.515	3.812	7.785
2013	2.290	4.867	1.225	2.487	3.515	7.354
2014	2.131	4.766	1.372	2.967	3.503	7.733
2015	1.995	3.807	807	1.740	2.802	5.627
2016	1.892	4.463	1.293	2.979	3.185	7.442
2017	1.796	4.436	1.290	3.099	3.086	7.535

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2017

Tabel 3.16.
Jumlah Siswa SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi Tahun 2016 - 2017

No	Tahun	Tingkat 1		Tingkat 2		Tingkat 3	
		L	P	L	P	L	P
1	2016	21591	20205	22446	21.176	22.335	20.955
2	2017	17817	17414	16470	15882	16135	15703

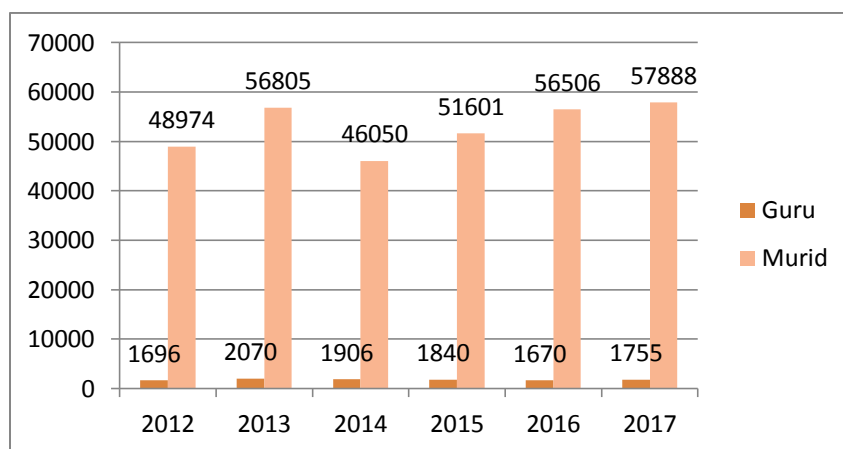
Sumber Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2017

Tabel 3.17.
Jumlah SMP Negeri, Guru dan Siswa SMP Negeri menurut Kecamatan dan Status Sekolah

Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid
-----------	---------	------	-------

Pondokgede	4	121	3.735
Jatisampurna	3	86	2.461
Pondokmelati	1	38	1.103
Jatiasih	7	270	7.103
Bantargebang	3	71	2.460
Mustikajaya	5	155	4.573
Bekasi Timur	6	270	7.016
Rawalumbu	4	148	4.497
Bekasi Selatan	4	176	4.603
Bekasi Barat	3	121	3.356
Medansatria	3	66	2.164
Bekasi Utara	6	233	5.904

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Grafik 3.5.

Jumlah Guru dan Murid SMP Negeri di Kota Bekasi Tahun 2012-2017

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Tabel 3.18.
Jumlah Siswa SMA Negeri dan Swasta di Kota Bekasi
Tahun 2016 - 2017

No	Tahun	Tingkat 1		Tingkat 2		Tingkat 3	
		L	P	L	P	L	P
1	2016	21591	20205	22446	21.176	22.335	20.955
2	2017*						

* Data untuk Tahun 2017 dst merupakan kewenangan Provinsi

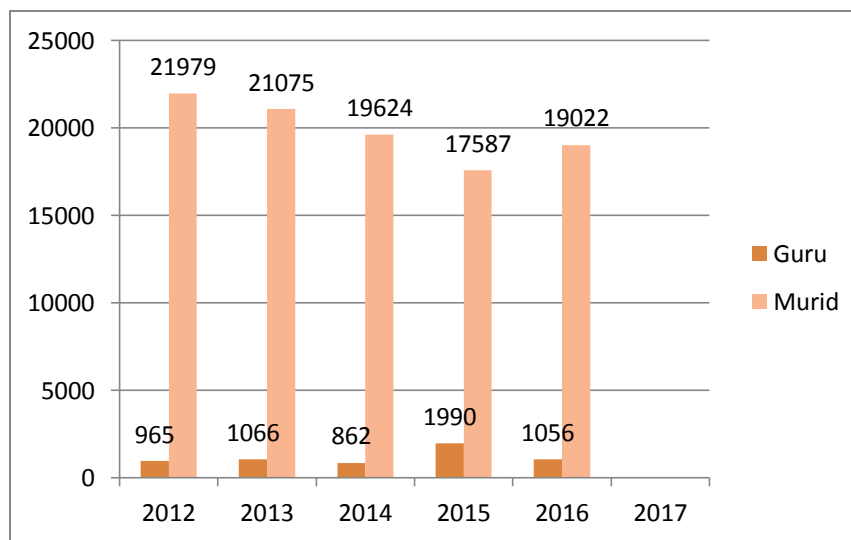
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Tabel 3.19.
Jumlah Guru SMA Negeri dan Swasta di Kota Bekasi Tahun 2016 - 2017

Tahun	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
2012	18	75	965	1.741	21.979	15.352
2013	18	75	1.066	1.085	21.075	14.360
2014	18	74	862	1.305	19.624	17.036
2015	18	72	1.990	1.469	17.587	16.830
2016	18	85	1.056	1.813	19.022	21.381
2017	26	116	-	-	-	-

* Data untuk Tahun 2017 dst merupakan kewenangan Provinsi

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Grafik 3.6.

Jumlah Guru dan Murid SMA Negeri di Kota Bekasi Tahun 2012 – 2016

*2017 sudah wewenang provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2017

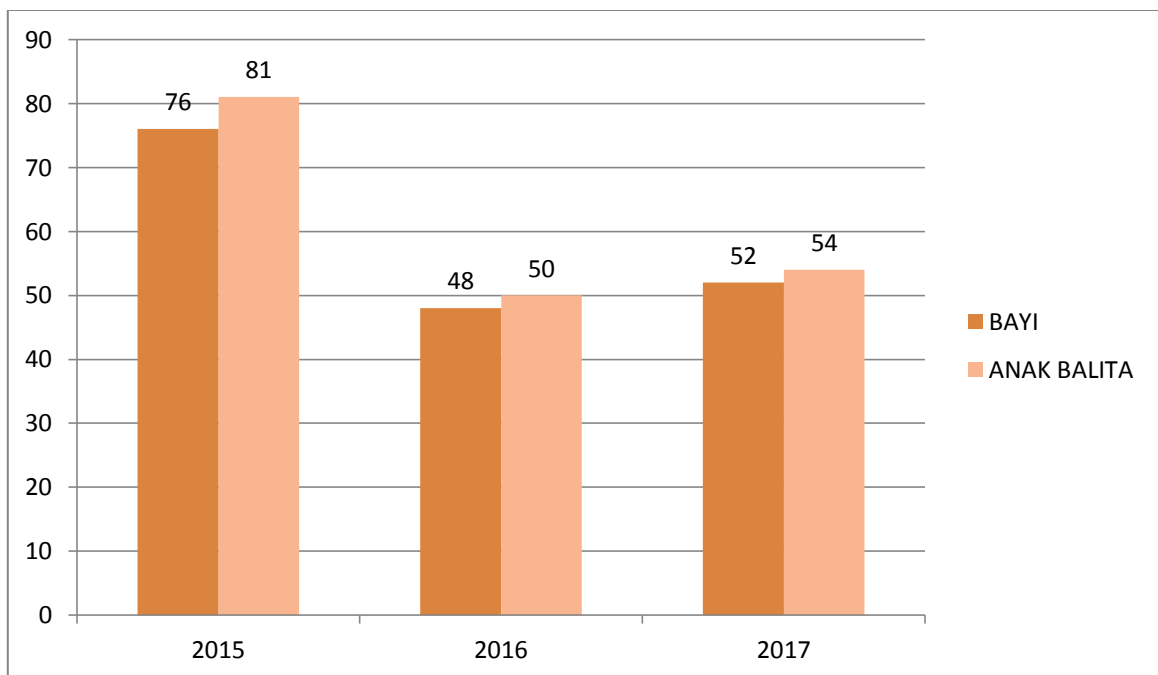
2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Bayi adalah anak berusia 0 - 1 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 tahun

dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun.

Pada tahun 2015 kasus kematian bayi sebanyak 76 dan anak balita sebanyak 81. Selanjutnya, tahun 2016 kasus kematian bayi dan anak balita sebanyak 98 kasus. Sedangkan tahun 2017 kasus kematian bayi, anak balita dan balita sebanyak 106.



Grafik 3.7.
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita di Kota Bekasi
Tahun 2015 - 2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Penyebab kematian bayi di Kota Bekasi sebagian besar adalah masalah yang terjadi pada bayi baru lahir/neonatal (umur 0-28 hari). Masalah neonatal ini meliputi asfiksia (kesulitan bernafas saat lahir), Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan infeksi. Diare dan pneumonia merupakan penyebab kematian berikutnya pada bayi dan balita, disamping penyakit lainnya serta dikontribusi oleh masalah gizi.

Kematian balita dihitung pada anak usia 0 – 5 tahun. Penyebab kematian pada balita adalah penyakit infeksi, diare dan pneumonia. Diare erat kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat, ketersediaan air bersih, serta sanitasi dasar. Pneumonia terkait erat dengan indoor and outdoor pollution (polusi didalam dan di luar ruangan), ventilasi, kepadatan hunian, jenis bahan bakar yang dipakai, kebiasaan merokok, status gizi, status imunisasi dan lama pemberian ASI.

Beberapa faktor menjadi penyebab tidak langsung kematian bayi dan balita. Dari sisi kebutuhan (demand), antara lain adalah sosial ekonomi yang rendah, pendidikan ibu, kondisi sosial budaya yang tidak mendukung, kedudukan dan peran perempuan yang tidak mendukung, akses sulit, serta perilaku perawatan bayi dan balita yang tidak sehat. Sementara ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum merata, kesinambungan pelayanan KIA yang belum memadai, pembiayaan pelayanan KIA yang belum memadai, menyumbangkan masalah dari sisi supply

Cakupan Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 sebanyak 13,8 %, Tahun 2014 sebanyak 13,4 %, Tahun 2015 44 % dan pada tahun 2016 sebanyak 23,2 %. Rendahnya cakupan ASI Eksklusif ini antara lain karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ASI eksklusif, ibu yang bekerja, dan masih sedikitnya tenaga konselor laktasi maupun kelompok pendukung laktasi yang diharapkan dapat memberikan bantuan kepada ibu menyusui ketika menghadapi masalah dalam pemberian ASI.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

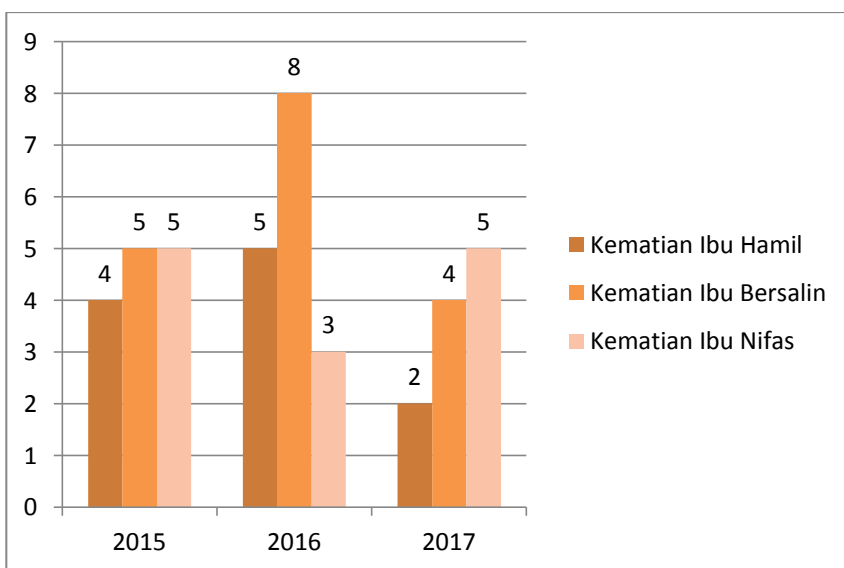
Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah banyaknya wanita yang meninggal karena suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan

dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Manfaat AKI adalah untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan sewaktu ibu melahirkan, dan masa nifas.

Dari hasil survei diketahui masih sedikitnya persentase kesempatan ibu hamil yang mengalami komplikasi obstetrik dan neonatal untuk ditangani di rumah sakit, yaitu hanya 23 persen. Ada lagi masalah seperti akses pelayanan kesehatan dan kegawatdaruratan yang juga menyumbang AKI dan AKB. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk dapat menurunkan AKI. Salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan angka kematian ibu adalah dengan meningkatkan pelayanan ANC terpadu dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.

Jumlah kematian ibu di Kota Bekasi dari Tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah kasus kematian ibu adalah sebanyak 29 kasus menurun menjadi 22 kasus pada tahun 2014, tahun 2016 sebanyak 16 dan tahun 2017 sebesar 11 orang.



Grafik 3.8.

Jumlah Kematian Ibu di Kota Bekasi Tahun 2015 - 2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2017

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul adalah pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang kejang, aborsi, dan infeksi. Namun, ternyata masih ada faktor lain yang juga cukup penting. Misalnya, pemberdayaan perempuan yang tak begitu baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, kebijakan juga berpengaruh. Kaum lelaki pun dituntut harus berupaya ikut aktif dalam segala permasalahan bidang reproduksi secara lebih bertanggung jawab. Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena masalah ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah perlu diubah secara sosiokultural agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat. Sangat diperlukan upaya peningkatan pelayanan perawatan ibu baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama suami.

Pendarahan menempati persentase tertinggi penyebab kematian ibu (28 persen) , anemia dan kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil menjadi penyebab utama terjadinya pendarahan dan infeksi yang merupakan faktor kematian utama ibu. Di berbagai negara paling sedikit seperempat dari seluruh kematian ibu disebabkan oleh pendarahan; proporsinya berkisar antara kurang dari 10 persen sampai hampir 60 persen. Walaupun seorang perempuan bertahan hidup setelah mengalami pendarahan pasca persalinan, namun ia akan menderita akibat kekurangan darah yang berat (anemia berat) dan akan mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan.

Persentase tertinggi kedua penyebab kematian ibu yang adalah eklamsia (24persen), kejang bisa terjadi pada pasien dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) yang tidak terkontrol saat persalinan. Hipertensi

dapat terjadi karena kehamilan, dan akan kembali normal bila kehamilan sudah berakhir. Namun ada juga yang tidak kembali normal setelah bayi lahir. Kondisi ini akan menjadi lebih berat bila hipertensi sudah diderita ibu sebelum hamil. Sedangkan persentase tertinggi ketiga penyebab kematian ibu melahirkan adalah infeksi (11 persen).

Penurunan AKI dapat ditekan dengan meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Bekasi dari tahun 2013 – 2017 fluktuatif. Pada tahun 2013 cakupan tersebut sebesar 85,9% meningkat pada tahun 2012 menjadi 87,5% dan mengalami penurunan hingga tahun 2014 menjadi 84,9%, tahun 2015 sebesar 90,15 %, tahun 2016 sebesar 88,3 dan pada tahun 2017 sebesar 87,98%. Kondisi ini dibawah target yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dalam Standar Pelayanan Minimal (741/2008) yaitu 90% tahun 2010.

a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4)

Kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya juga menjadi penting dalam menekan angka kematian ibu hamil. Tingkat kesadaran ibu hamil dapat dilihat dari cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke-empat (atau lebih) untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, dengan ketentuan: satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga (Depkes RI, 2004).

b. Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Tetanus Toxoid

Tabel 3.20.
Cakupan Ibu hamil yang Mendapat Imunisasi Tetanus Toxoid Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Imunisasi Tetanus Toksoid Pada Ibu Hamil					
		TT1	TT2	TT3	TT4	TT5	TT+2
2013	57.040	59,4	52	22,6	14,2	8,8	48.044
2014	58,586	57,7	48,8	23,1	14,8	8	55,468
2015		54,5	48,2	24,3	15,8	9,2	
2016	55.682	56,7	49,3	27,4	16,4	9,4	102,6
2017	56,143	50,4	45,0	24,1	16,8	7,7	93,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2017

c. Ibu Nifas yang Mendapat Vit A berdasarkan Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2017

Tabel 3.21.
Ibu Nifas yang Mendapat Vit A berdasarkan Kecamatan dan Puskesmas Tahun 2017

KECAMATAN	PUSKESMAS	IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
		JUMLAH	%
Pondok Gede	Pondok Gede	1983	85,93
	Jati Makmur	1209	84,64
	Jati Bening	1779	92,87
Pondok Melati	Jati Rahayu	1225	84,20
	Jati Warna	1394	93,45
Jati Sampurna	Jati Sampurna	2445	91,15
Jati Asih	Jati Luhur	1350	91,47
	Jati Asih	3066	97,20
Rawa Lumbu	Bojong Rawalumbu	1220	73,72

	Pengasinan	1804	83,35
	Bojong Menteng	799	76,37
Bekasi Timur	Karang Kitri	1283	105,09
	Wisma Jaya	1002	90,64
	Aren Jaya	970	78,70
	Duren Jaya	1260	92,07
Bekasi Selatan	Pekayon Jaya	1050	80,57
	Jaka Mulya	1419	91,90
	Marga Jaya	276	90,04
	Perumnas II	640	55,42
Bekasi Utara	Seroja	1727	68,13
	Kali Abang Tengah	1818	90,37
	Marga Mulya	443	94,44
	Teluk Pucung	1828	88,86
Bekasi Barat	Rawa Tembaga	1135	79,07
	Bintara jaya	799	89,04
	Bintara	1371	92,03
	Kranji	890	98,06
	Kota Baru	864	91,67
Medan Satria	Pejuang	3243	92,46
Bantar Gebang	Bantar Gebang	1950	86,26
Mustikajaya	Mustikajaya	4195	90,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2017

3. Perhubungan

Manajemen lalu lintas merupakan pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan dan memperbaiki keselamatan dari pengguna jalan sebaik mungkin. Zona Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan salah satu program inovatif dalam bentuk zona kecepatan berbasis waktu yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan kendaraan di area sekolah pada jam tertentu.

Zona Selamat Sekolah (Zoss) adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintaskendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan. Pengendalian perlu dilakukan mengingat banyak anak-anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolah. ZOSS merupakan salah satu indikator Kota Layak Anak. Kota Bekasi memiliki Zona Selamat Sekolah yang tersebar pada beberapa lokasi. Jumlah ZOSS yang terpasang tahun 2009-2017 sebanyak 24 unit.

Perkembangan ZOSS setiap tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.22.
Jumlah Zona Selamat Sekolah

No	Tahun	Jumlah Zona Selamat Sekolah
1	2013	10
2	2014	7
3	2015	0
4	2016	4
5	2017	3
JUMLAH		19

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2017

Sementara pembangunan Ruang Henti Kendaraan (RHK) yang merupakan salah satu cara pengaturan lalu lintas dengan mengatur tempat antrian sepeda motor dengan kendaraan roda empat atau lebih pada saat berhenti di pendekat simpang bersinyal selama merah.

Keunggulan dengan adanya RHK adalah :

- ◆ Memperbaiki kinerja persimpangan jalan perkotaan dengan biaya rendah
- ◆ Mengurangi konflik lalu lintas sepeda motor dengan kendaraan lain
- ◆ Melancarkan arus lalu lintas dan mempercepat aliran persimpangan arus lalu lintas meningkat

Perkembangan Pembangunan Ruang Henti Kendaraan (RHK) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Jumlah Ruang Henti Kendaraan (RHK)		
No	Tahun	Jumlah Ruang Henti Kendaraan (RHK)
1	2013	3
2	2014	0
3	2015	1
4	2016	0
5	2017	1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2017

4. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (Eksekutif)

Perempuan juga dituntut untuk berpartisipasi dalam lembaga Pemerintah. Hal ini terlihat dari salah satu pembentuk dari perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender. Pada tahun 2016 47.875 orang perempuan di lembaga pemerintah. Kurangnya partisipasi dalam lembaga pemerintah disebabkan oleh banyak faktor terutama adalah pembuat kebijakan yang belum memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan.

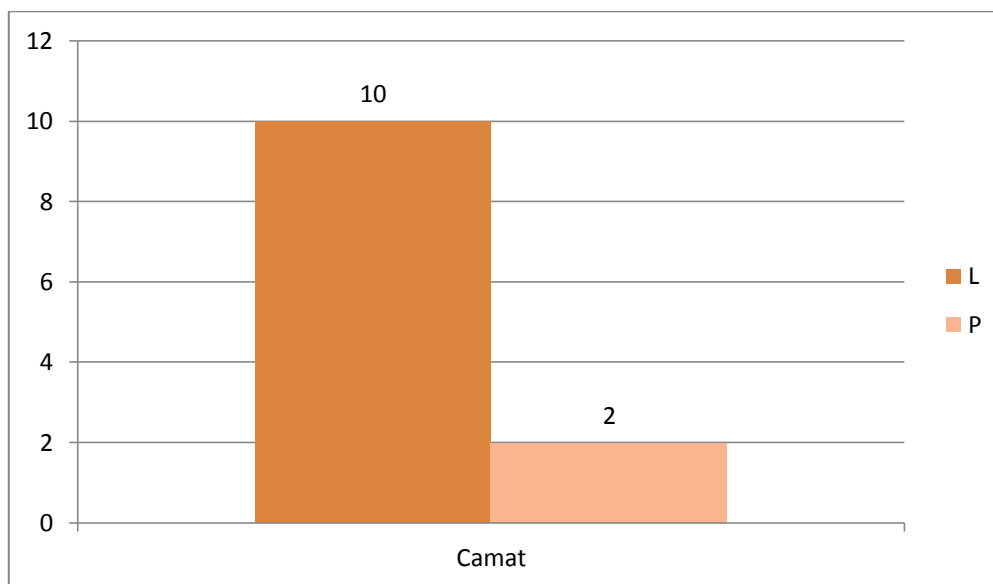
Dari 34 OPD yang ada di pemerintah Kota Bekasi, terdapat 1 (satu) OPD yang khusus menangani perempuan, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga dipimpin oleh perempuan. Berikut data PNS yang menduduki posisi sebagai Camat dan Lurah di Kota Bekasi:

Tabel 3.23.

Jumlah Camat dan Lurah di Kota Bekasi tahun 2017						
No.	Kecamatan	Camat		Lurah		Total
		L	P	L	P	
1.	Bekasi Timur	1	-	4	-	5
2.	Bekasi Barat	1	-	3	2	6
3.	Bekasi Utara	1	-	4	2	7

4.	Bekasi Selatan	1	-	4	1	6
5.	Jatiasih	1	-	5	1	7
6.	Pondokgede	1	-	4	1	6
7.	Rawalumbu	1	-	4	-	5
8.	Jatisampurna	1	-	4	1	6
9.	Medansatria	1	-	3	1	5
10.	Bantargebang	1	-	3	1	5
11.	Pondokmelati	-	1	3	1	5
12.	Mustikajaya	-	1	4	-	5
	Jumlah	10	2	45	11	68

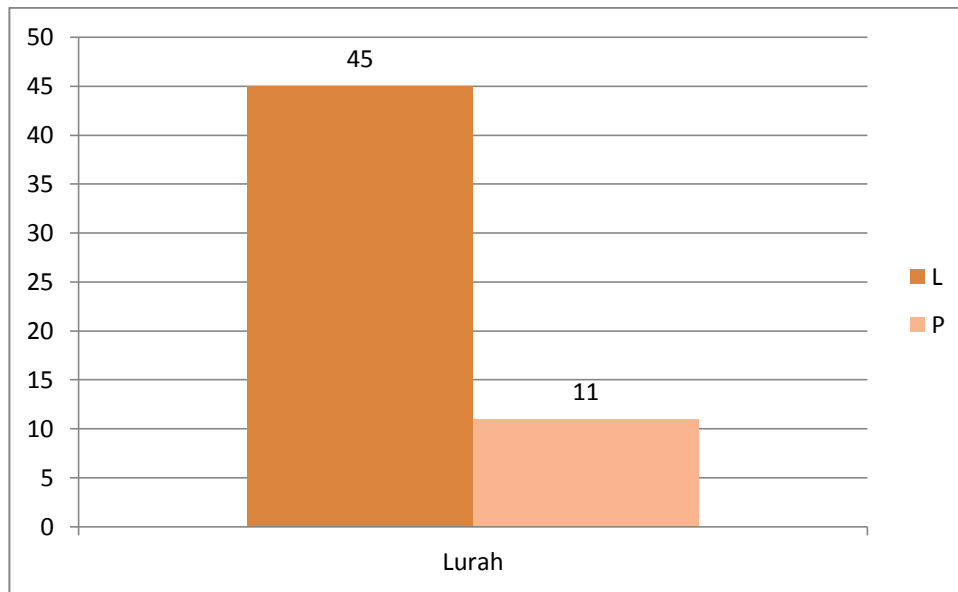
Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi 2017



Grafik 3.9.

Camat di Kota Bekasi tahun 2017

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi 2017



Grafik 3.10.

Lurah di Kota Bekasi tahun 2017

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi 2017

Dari grafik tampak bahwa kepala OPD masih didominasi oleh laki-laki. Walau hanya sekitar 25% kepala OPD adalah perempuan, hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Bekasi masih mengikutsertakan perempuan dalam ranah pemerintahan khususnya pada bidang eksekutif.

b. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (Legislatif)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kebijakan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) yang berguna untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun sejauh ini usaha-usaha pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk meningkatkan partisipasi perempuan tersebut belum optimal. Meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama mencalonkan diri, mengikuti kampanye, dan memberikan suara dalam pemilu, tetapi jumlah perempuan terpilih menjadi anggota legislatif

belum mencapai 30% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan pemilihan umum.

Di Kota Bekasi persentase perempuan dalam legeslatif hanya 17% (8 orang) sementara dalam melakukan afirmatif action diharapkan mencapai 30%. Pada tahun 2013 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membuat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif dengan maksud memberikan pedoman bagi daerah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Tabel 3.25.
Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2014 -2019

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Nasdem	-	-	-
PKB	1	-	1
PKS	6	1	7
PDIP	10	2	12
Golkar	6	2	8
Gerindra	4	2	6
Demokrat	4	-	4
PAN	4	-	4
PPP	3	1	4
Hanura	4	-	4
PBB	-	-	-
PKPI	-	-	-
Jumlah	42	8	50

Sumber: Kota Bekasi dalam Angka 2017

c. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

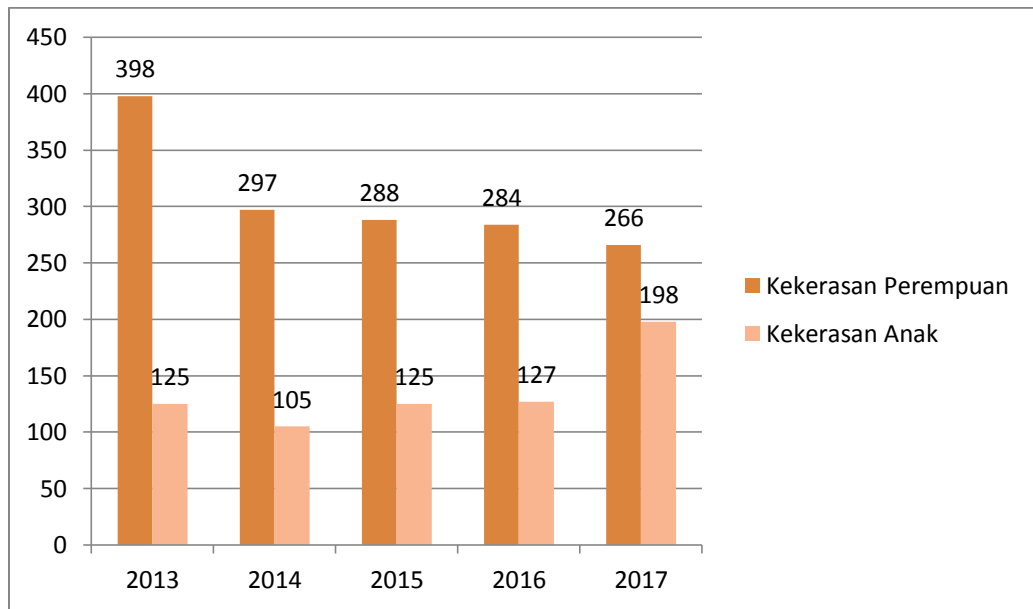
Partisipasi perempuan di lembaga swasta juga merupakan pembentuk perhitungan IDG. Pada lembaga swasta peran perempuan pada tahun 2017 sebanyak 174.017 orang, kondisi ini juga masih relatif rendah.

d. Jenis Kekerasan Pada Anak dan Perempuan

Jumlah kekerasan pada perempuan dari tahun 2013 – 2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 398 orang, pada tahun 2014 menjadi 297 kasus, tahun 2015 menjadi 288kasus, tahun 2016 sebanyak 284 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 266 kasus. Seluruh kasus yang dilaporkan mendapat penanganan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi jumlah kekerasan pada anak Kota Bekasi jumlahnya fluktuatif dimana tahun 2013 sebanyak 125, Tahun 2014 105, Tahun 2015 sebanyak 125, tahun 2016 sebanyak 127 dan pada Tahun 2017 sebanyak 198. Jenis kekerasan yang menimpa anak terdiri dari kekerasan fisik, penganiayaan, pelecehan seksual, kekerasan psikis, perkosaan/pencabulan, persetubuhan, pencurian, kesehatan, penelantaran, bullying, eksploitasi, hak asuh anak dan lain2.

Melihat data dari tahun ke tahun yang paling banyak kekerasan adalah yang berorientasi pada masalah sex apakah itu persetubuhan, pencabulan atau pelecehan seksual.



Grafik 3.11.
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Bekasi Tahun 2013-2017

Sumber: DPPP Kota Bekasi Tahun 2017

e. Kelembagaan

1) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Kelembagaan gender yang ada di Kota Bekasi yaitu Kader Bina Keluarga Balita (BKB); Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan; Pokja PUG; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan penanganan korban.

Selain itu dalam rangka meningkatkan PUG, di Kota Bekasi telah banyak diterbitkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan gender seperti Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang responsif gender, dan Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan tentang perlindungan perempuan;. Selain itu juga telah ada Rumah Aman (Shelter) untuk perempuan dan anak korban kekerasan.

2) Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Sedangkan untuk pengarusutamaan hak anak (PUHA), telah

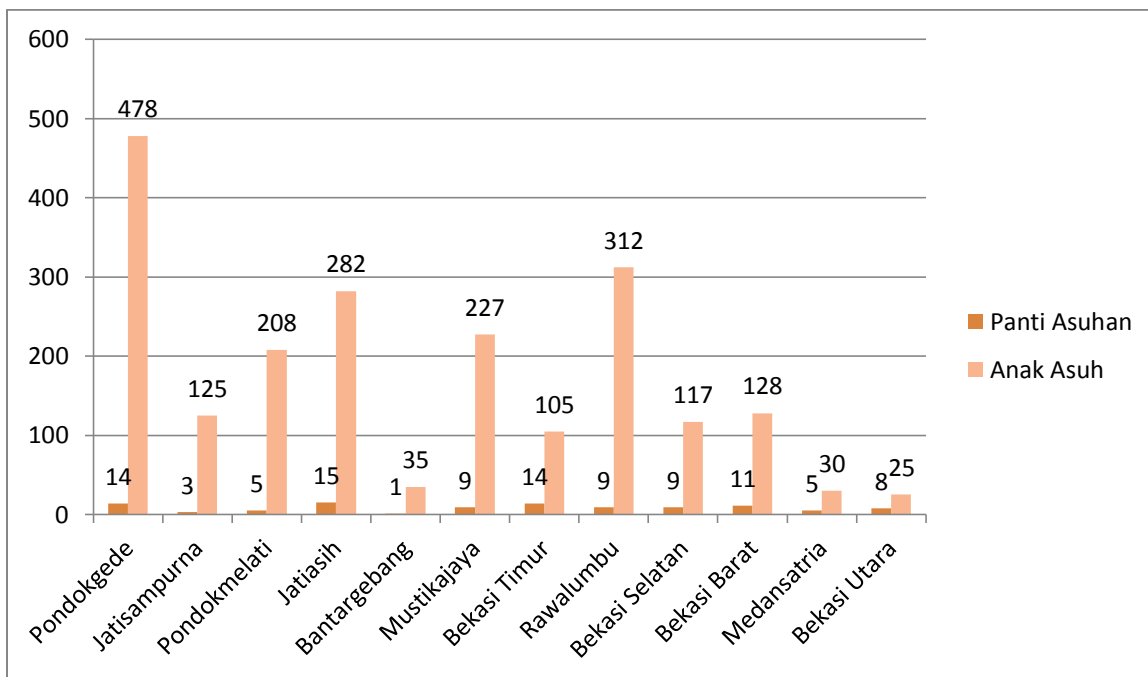
disusun kebijakan/Perda terkait dengan program/kegiatan yang peduli anak. Selain itu juga telah ada beberapa kelembagaan terkait dengan PUHA. Kelembagaan PUHA yang ada di Kota Bekasi yaitu:

- Bina Keluarga Balita (BKB)
- Posyandu
- Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Organisasi/Forum Anak
- Telepon Sahabat Anak 129
- Gugus Tugas Trafiking
- Gugus Tugas KLA
- Lembaga Perlindungan Anak
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)
- Panti Asuhan Anak Yatim Piatu

5. Sosial

a. Sarana Pelayanan Sosial

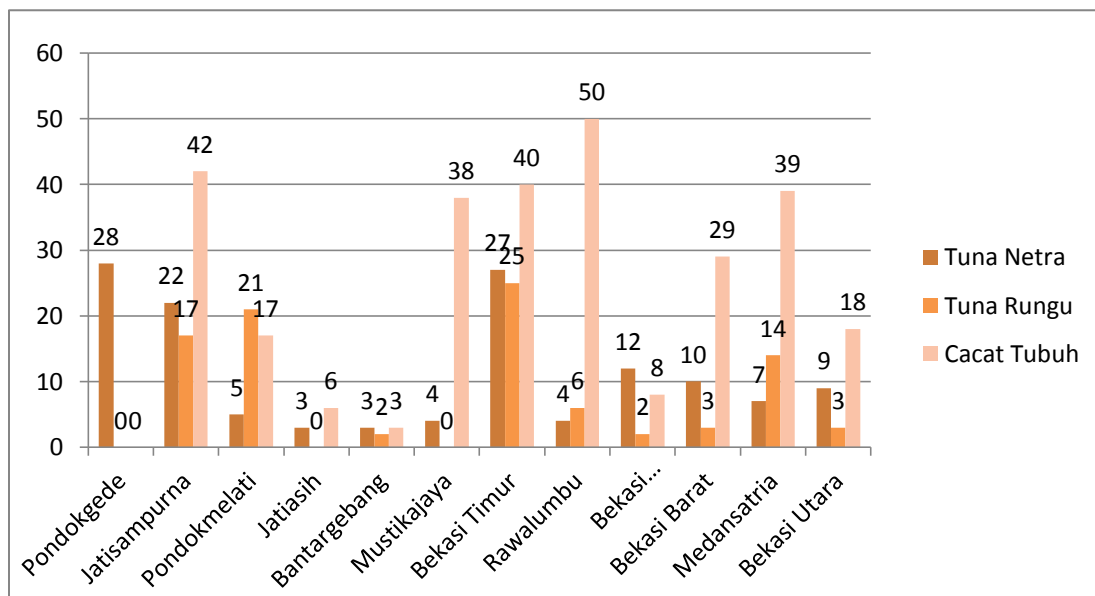
Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi merupakan sarana pelayanan sosial yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.



Grafik 3.12.
Jumlah Panti Asuhan dan Anak Asuh di Kota Bekasi Tahun 2017
Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2015

b. Anak Cacat

Anak cacat adalah yang penampilan gerakannya menyimpang dari gerakan normal secara keseluruhan. Sedangkan menurut The Committee Of National Society For The Study Of Education di AS, anak cacat adalah gerakan-gerakan yang menyimpang dari gerakan yang normal, walupun telah dikembangkan secara maksimal. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dari segi Fisik, mental, tingkah laku, emosional dan sosial. Perbedaan utama anak cacat dengan anak normal terletak pada keadaan atau kondisi fisik termasuk alat-alat fisik yang tidak lengkap sehingga ia tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya seperti yang dilakukan anak normal.



Grafik 3.13.
Jumlah Penyandang Cacat dengan Kategori Tuna Netra, Tuna Rungu dan Cacat Tubuh di Kota Bekasi Tahun 2017

c. Penyandang HIV/ AIDS

HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit.

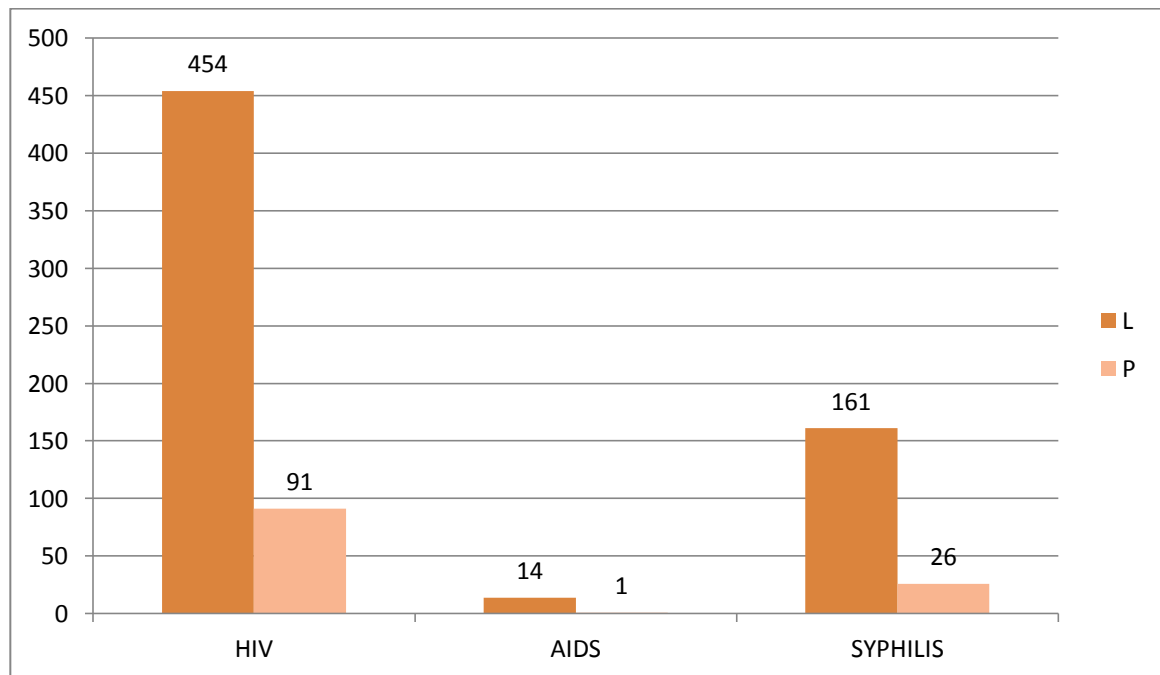
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang menggambarkan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV telah merupakan penyebab AIDS. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS.

Penyandang AIDS di Kota Bekasi tahun 2010 sebanyak 39 laki-laki dan 31 perempuan, tahun 2014 jumlah penyandang AIDS meningkat menjadi 101 laki-laki dan 32 perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26.
Jumlah Penyangang HIV, AIDS dan Syphilis Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2013-2017

Tahun	HIV		AIDS		SYPHILIS	
	L	P	L	P	L	P
2015	210	100	92	63	1.241	3.031
2016	468	147	109	59	126	80
2017	454	91	14	1	161	26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2017



Grafik 3.14.
Jumlah Penyangang HIV, AIDS dan Syphilis Tahun 2017

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi

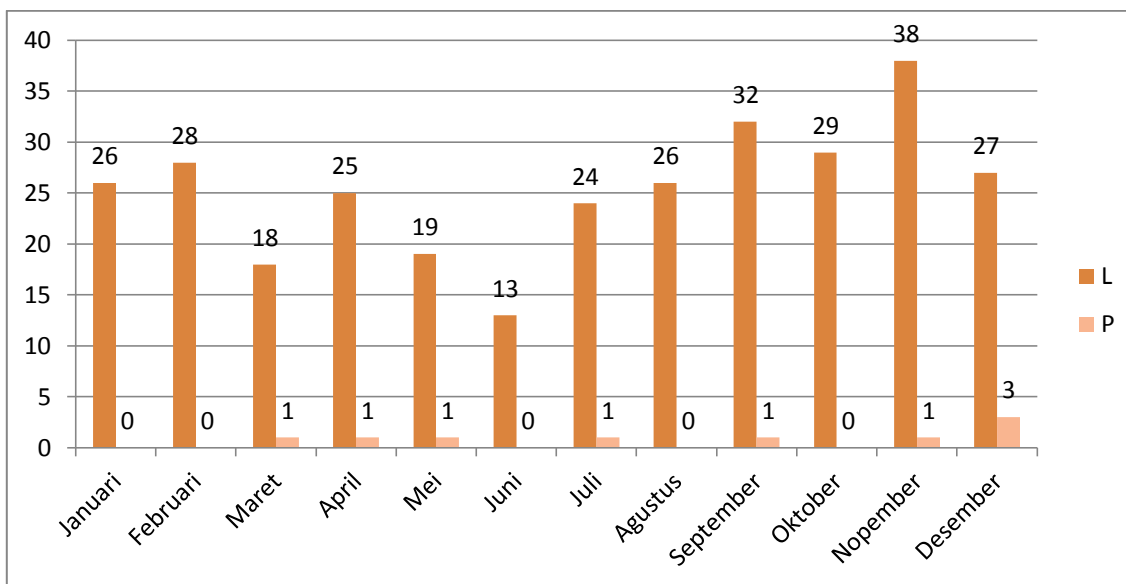
d. Narkoba

Tabel 3.44.
Jumlah Kasus Narkoba di Kota Bekasi Tahun 2012 -2017

Tahun	Kasus	L	P	Jumlah
2012	325	379	15	458
2013	330	394	6	400
2014	374	418	4	422

2015	409	494	11	505
2016	154	153	4	157
2017	266	305	9	314

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2018



Grafik 3.15.

Jumlah Kasus Narkoba di Kota Bekasi tahun 2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2018

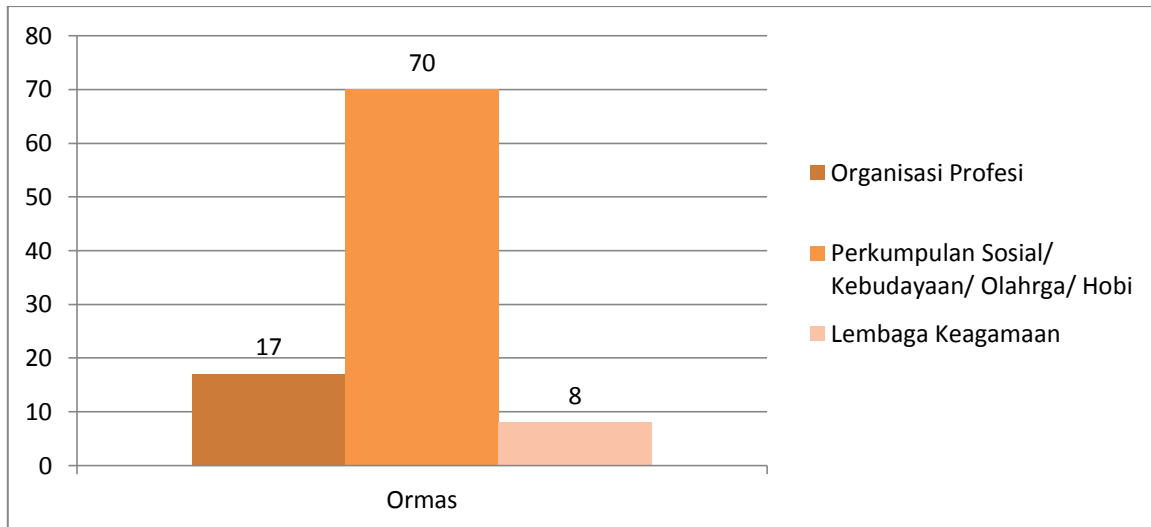
6. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Jumlah Ormas

Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Jumlah ormas di Kota Bekasi mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana tahun 2010 jumlah ormas sebanyak 12 ormas, meningkat mencapai 50 ormas di tahun 2012. Pada tahun 2014

jumlah ormas menurun menjadi 20 ormas. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Grafik 3.16.

Jumlah Ormas di Kota Bekasi Tahun 2017

Sumber: Kesbangpolinmas Kota Bekasi Tahun 2017

b. Persentase Partisipasi Perempuan Di Legislatif (anggota dewan)

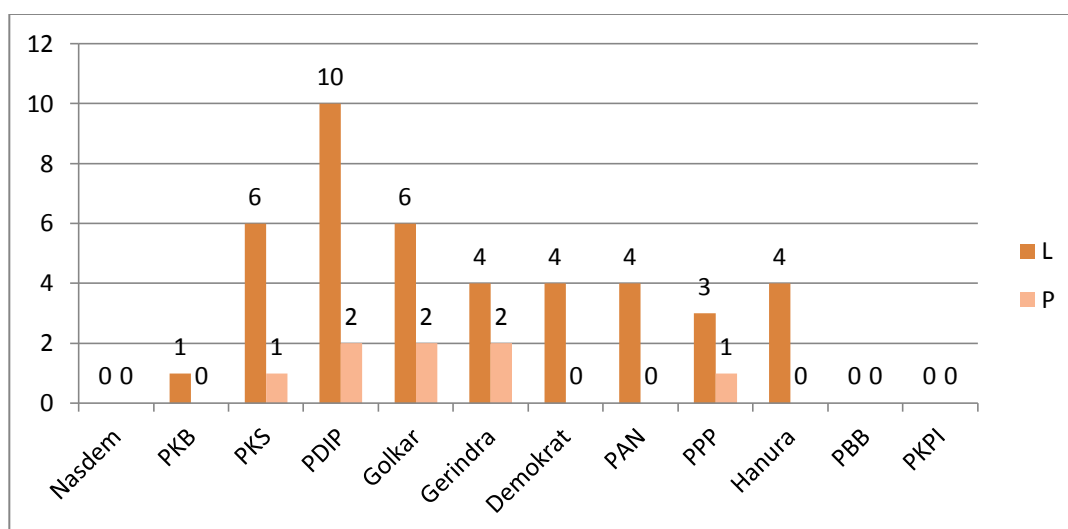
Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif tahun 2014-2019 sebesar 16%. Persentase ini belum dapat memenuhi undang-undang yang menyatakan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Tabel 3.27.
Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2014 -2019

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Nasdem	-	-	-
PKB	1	-	1
PKS	6	1	7
PDIP	10	2	12
Golkar	6	2	8
Gerindra	4	2	6

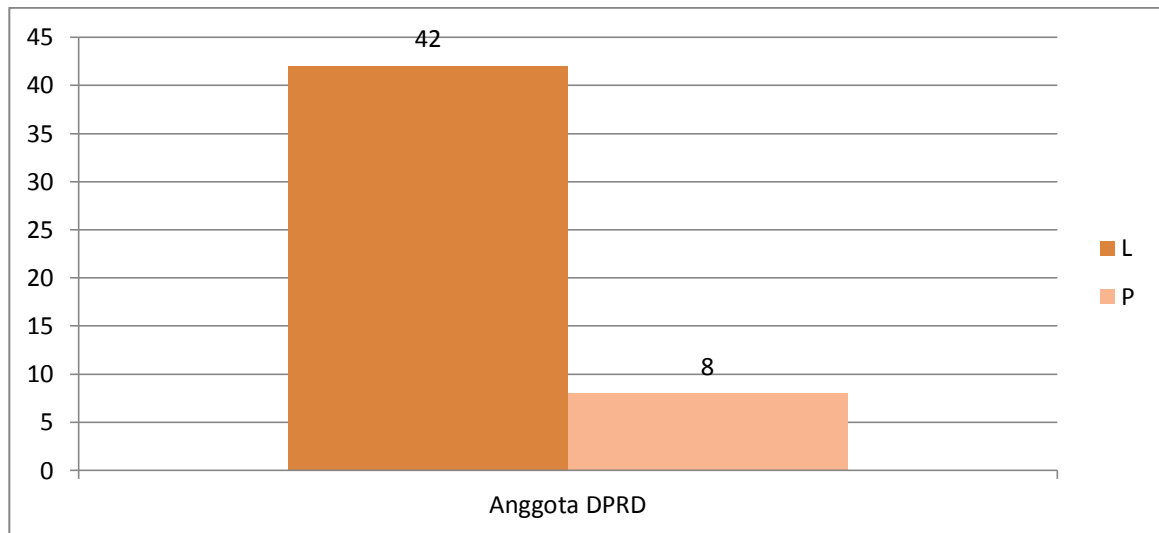
Demokrat	4	-	4
PAN	4	-	4
PPP	3	1	4
Hanura	4	-	4
PBB	-	-	-
PKPI	-	-	-
Jumlah	42	8	50

Sumber: BKPPD Kota Bekasi Tahun 2018



Grafik 3.17.
Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Partai Tahun 2017

Sumber: BKPPD Kota Bekasi Tahun 2018



Grafik 3.18.

Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: BKPPD Kota Bekasi Tahun 2018

c. Persentase Partisipasi Perempuan di Yudikatif (anggota dewan)

Tabel 3.28.

Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Kota Bekasi Tahun 2018

Tahun	Jumlah Hakim		Total
	L	P	
2013	3	9	12
2014	6	5	11
2015	7	4	11
2016	6	6	12
2017	8	4	12
2018	8	5	13+ketua dan wakil

Sumber: Pengadilan Agama Kota Bekasi 2018

Tabel 3.29.

Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Tahun 2017

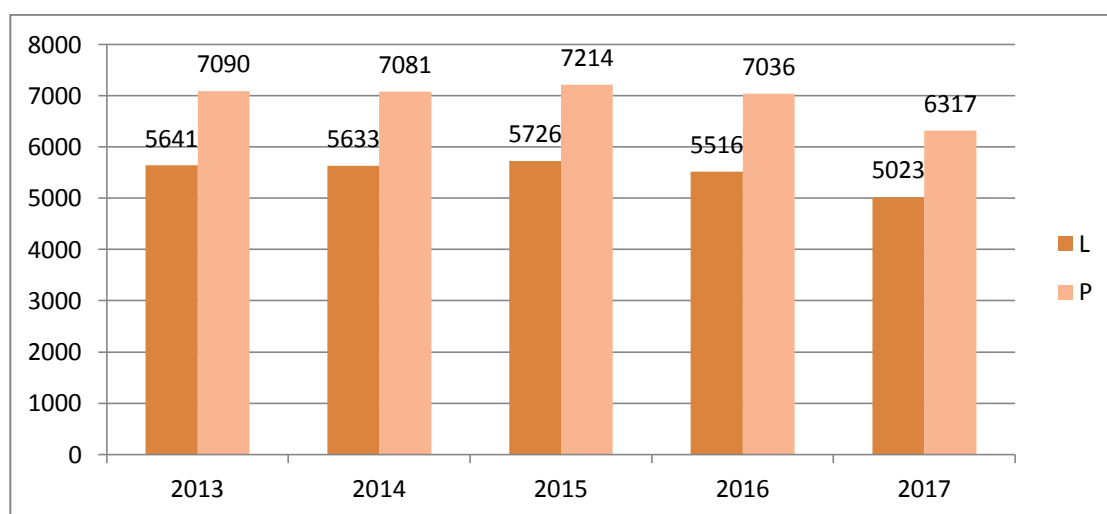
Tahun	Jumlah Hakim		Total
	L	P	
2012	12	24	36
2013	12	24	36
2014	10	23	33

2015	10	24	34
2016	11	24	35
2017	11	24	35

Sumber: *Pengadilan Agama Kota Bekasi 2018*

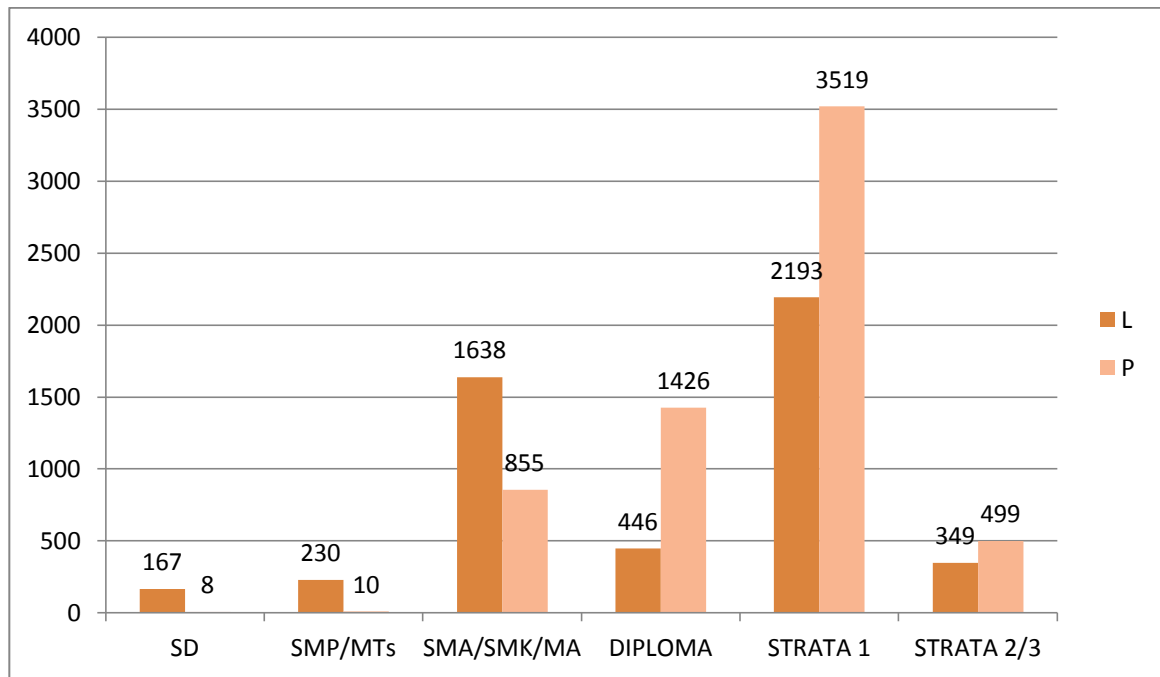
d. Jumlah PNS (orang)

Jumlah PNS di Kota Bekasi mengalami perkembangan yang menurun. Tahun 2011 jumlah PNS di Kota Bekasi sebanyak 13.392 orang terbagi atas 6.020 laki-laki dan 7.372 perempuan. Tahun 2014 menurun menjadi 12.714 orang, terbagi atas 5.633 laki-laki dan 7.081 perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 3.19.
Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2017

Sumber: BKPPD Kota Bekasi Tahun 2018

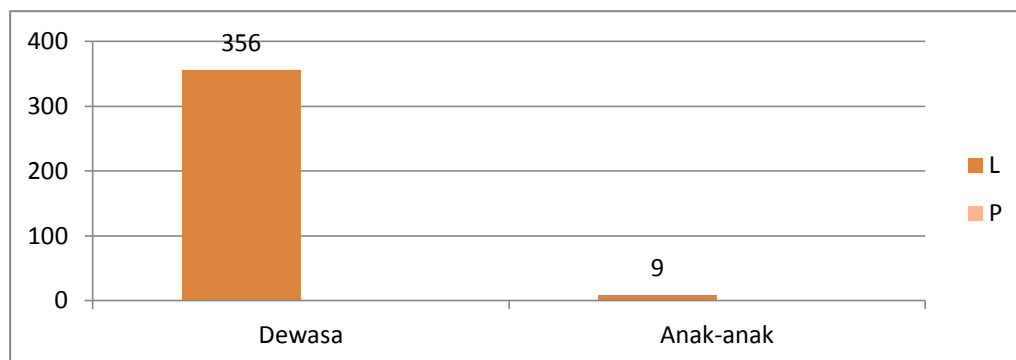


Grafik 3.20.
Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

Sumber: BKPPD Kota Bekasi Tahun 2018

e. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Jumlah penghuni lapas di Kota Bekasi mengalami perkembangan yang fluktuaktif. Berikut disajikan data Penghuni Lapas menurut kelompok umur tahun 2016.

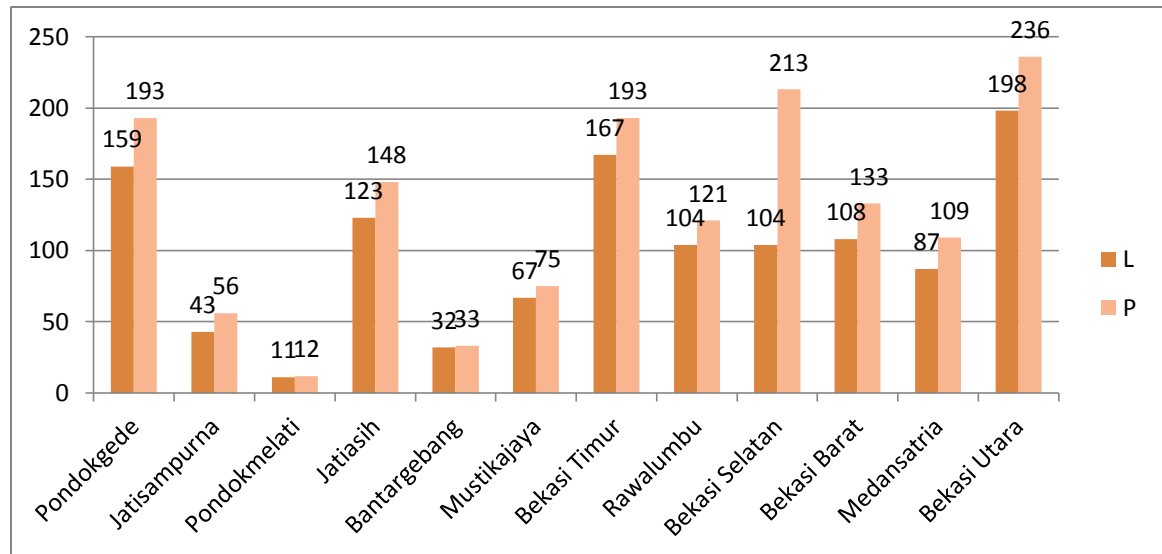


Grafik 3.21.
Jumlah Penghuni Lapas Kota Bekasi Tahun 2016

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2017

7. Jamaah Haji

Berikut disajikan data jumlah jamaah haji yang diberangkatkan menurut jenis kelamin dan per kecamatan tahun 2017.



Grafik 3.22.

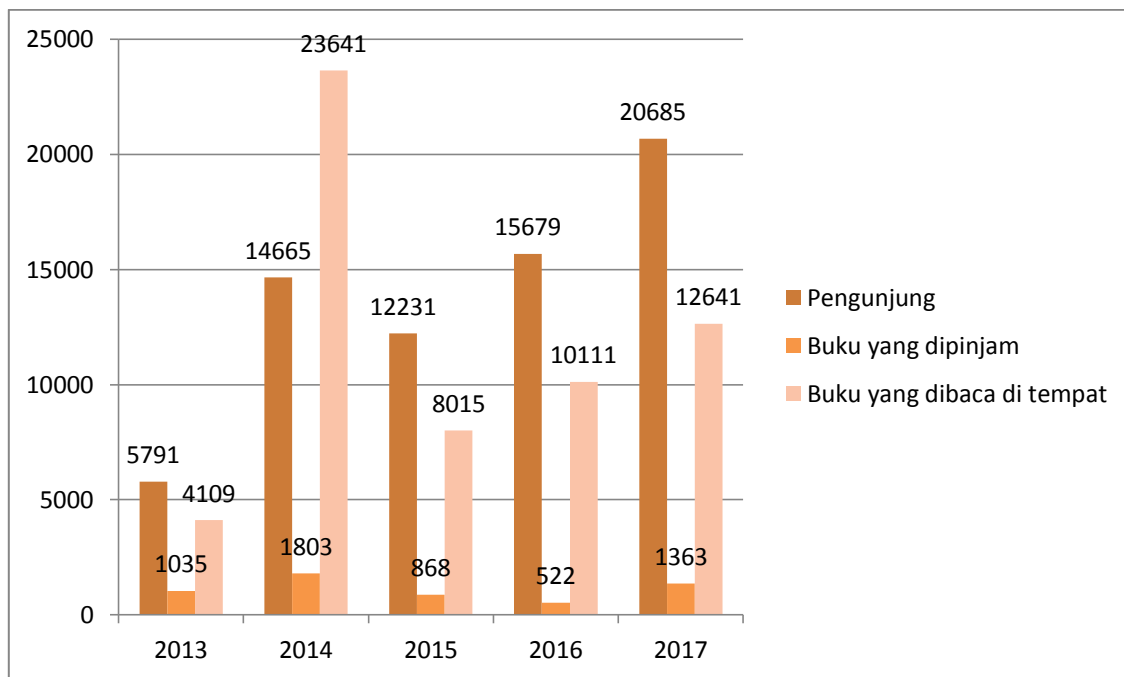
Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan menurut jenis kelamin dan per kecamatan tahun 2017

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2018

8. Perpustakaan

Menurut UU Perpustakaan pada Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Indikator keberhasilan pelayanan perpustakaan salah satunya ditunjukkan dari peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Perkembangan selengkapny dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.23.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017

Sumber: Bapusipda Kota Bekasi 2017

9. Ketenagakerjaan

Tabel 3.30.

Jumlah Pencari Kerja Tendaftar, Lowongan dan Penempatan Tahun 2017

Bulan	Pencari Kerja Tendaftar		Jumlah	Penempatan Tenaga Kerja		Jumlah
	L	P		L	P	
Januari	987	782	1.769	44	50	94
Februari	660	540	1.200	47	43	90
Maret	710	567	1.277	204	173	377
April	580	447	1.027	24	12	36
Mei	2.782	3.110	5.892	22	27	49
Juni	606	548	1.154	773	765	1.538
Juli	2.048	1.926	3.974	251	245	496
Agustus	1.228	1.130	2.358	133	55	188
September	814	834	1.648	155	148	303
Oktober	917	828	1.745	28	30	58
Nopember	1.085	802	1.887	976	796	1.772

Desember	571	518	1.089	3.839	1.857	5.696
Jumlah	12.988	12.032	25.020	6.496	4.201	10.697

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi 2017

BAB IV

PEMANFAATAN DATA GENDER

A. Isu-isu Gender Kota Bekasi

Beberapa isu gender yang dapat diambil dari pelaksanaan pengumpulan data gender di Kota Bekasi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya angka harapan hidup laki-laki dibandingkan perempuan (L=72,73 tahun, P=76,50 tahun);
2. Adanya kesenjangan dalam capaian rata-rata lama sekolah (L=11,76 tahun, P=10,62 tahun);
3. Tingginya ketimpangan sumbangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan (L=72,60%, P=29,05%);
4. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam legislatif (16%);
5. Adanya ketimpangan jumlah guru laki-laki dan perempuan khususnya pada jenjang pendidikan usia dini (L=283 orang, P=5.588 orang);
6. Tingginya kasus kematian ibu melahirkan (11 kasus), bayi, dan balita (106 kasus);
7. Tingginya kasus kekerasan pada anak (105 kasus) dan kasus KDRT (138 kasus);
8. Rendahnya kemauan laki-laki untuk ber-KB (19.760 laki-laki berbanding 351.447 perempuan);
9. Tingginya jumlah laki-laki yang menderita HIV dan AIDs;
10. Rendahnya komposisi perempuan dalam kepengurusan ormas (L=45, P=11);

B. Pemanfaatan Data Gender Dalam *Gender Analysis Pathway* (GAP)

GAP memberi perspektif baru, yaitu perspektif gender yang melihat permasalahan dan penanganannya serta pengukurannya dari kemaslahatan laki-laki dan perempuan. Nilai dan perilaku yang diubah adalah pendekatan lama yang bersifat netral, yang berasumsi bahwa kebijakan, program dan kegiatan dimaksudkan untuk masyarakat; tetapi mengabaikan kenyataan

yang "tersembunyi" akan adanya perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dasarnya *gender stereotype*.

GAP merupakan alur yang logis dan konsisten. Aplikasikan GAP, memberi perspektif baru yang harus dilalui dalam keseluruhan siklus perencanaan, dimulai dari mereformulasikan tujuan (kebijakan, program, kegiatan), memetakan situasi sebagai pembuka wawasan, mengidentifikasi isu (gender) yang harus dicermati serta program kegiatan untuk merespon permasalahan sampai dengan indikator yang akan dipakai.

GAP membangun komunikasi dan kerjasama yang partisipatif. GAP memberi ruang untuk pihak lain (eksekutif, legislatif dan masyarakat madani) berpartisipasi dan memberi masukan; sehingga proses perencanaan dapat mempertimbangkan dan kemudian mengakomodasi kebutuhan, kepentingan serta pengalaman berbagai pihak, termasuk perempuan, yang selama ini terabaikan. Perilaku yang diubah di sini adalah proses perencanaan pembangunan tidak lagi menjadi ranah rencana semata.

Melalui analisis gender akan dapat ditemukeni isu gender yang selama ini dianggap sebagai sesuatu hal yang „biasa“ dan „kodrati“, padahal dasarnya adalah pelabelan berdasarkan atas jenis kelamin (*gender stereotype*). *Gender stereotype* ini sering terbawa ke dalam proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, atau ketika mengkonstruksi perencanaan, sehingga menghasilkan suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang tidak sensitif/responsif terhadap isu-isu gender. Oleh sebab itu, penanganan isu gender (yang menyangkut: kebutuhan, kepentingan, pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki) dalam proses perencanaan kebijakan, program, kegiatan pembangunan menjadi sangat penting dan perlu diakomodasi.

Perencanaan pembangunan responsif gender adalah perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, pengalaman yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan itu. Analisis gender dilakukan di 3 (tiga) tingkatan. Pertama, di tingkat penyusunan program; kedua, di

tingkat internal lembaga/satuan kerja; dan ketiga, di tingkat pelaksanaan, dengan memperhatikan 4 (empat) faktor utama penyebab kesenjangan gender. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Faktor akses. Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan?
2. Faktor kontrol. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kontrol (penguasaan) yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan?
3. Faktor partisipasi. Bagaimana perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam program-program pembangunan dan dalam mengambil keputusan?
4. Faktor manfaat. Apakah perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan?

Piranti analisis gender GAP menurut Bappenas dilaksanakan dalam 9 (sembilan) langkah.

1. Langkah 1

- a. Menetapkan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dianalisis, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat. Pastikan Wajib dipastikan di tingkat apa yang akan dianalisis, apakah di tingkat kebijakan, program atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu, yaitu dalam (satu atau lebih) program dan atau (satu atau lebih) kegiatan.
- b. Periksa rumusannya, apakah responsif terhadap isu gender, yaitu isu yang menceminkan kebutuhan, kepentingan dan pengalaman laki-laki dan perempuan yang bisa berbeda. Karena kebijakan/program/kegiatan yang netral (netral gender), dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu, dapat berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.
- c. Perjelas dan pertajam tujuan yang ingin dicapai. Kalau memilih kebijakan yang akan dianalisis, maka yang akan diacu adalah tujuan dari kebijakan tersebut; demikian pula halnya apabila yang dipilih adalah program atau kegiatan. Perhatikan juga kurun waktu

pencapaian tujuan, misalnya apakah tujuan akan dicapai dalam waktu satu tahun, lima tahun, atau yang lain.

2. Langkah 2

- a. Menyajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender.
- b. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik, data kualitatif, hasil kajian, hasil pengamatan, dan/atau kearifan local (local wisdom).
- c. Data pembuka wawasan dapat diperoleh dari: untuk program baru: hasil baseline survey dan atau analisis situasi yang berkaitan dengan tujuan yang akan dianalisis. Contoh: Program: Upaya Kesehatan; Sub-program: Making Pregnancy Saver. Rumusan: Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan mendekatkan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2014 diharapkan cakupan pelayanan ante-natal meningkat menjadi 90%, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75%, cakupan pelayanan post-natal meningkat menjadi 90%.
7 Untuk program yang sudah berjalan: analisis situasi dan ditambah dengan hasil program yang (telah atau sedang) berjalan.
- d. Bila tidak tersedia data terpilah dapat diperoleh melalui FGD (focus group discussion) atau *rapid assessment*.

3. Langkah 3,4, dan 5 adalah menemukenali isu gender apakah di proses perencanaan (Langkah 3), internal lembaga (Langkah 4), dan/atau pada tahap pelaksanaan (Langkah 5).

- a. Langkah 3 Periksa dan analisis lebih lanjut data pembuka wawasan (Langkah 2) apa yang menyebabkan terjadinya isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki akses yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan; Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki kontrol (penguasaan) yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan; Apakah kebijakan/program/kegiatan

memberikan perempuan dan laki-laki partisipasi yang sama dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan; dan Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan manfaat yang sama terhadap perempuan dan laki-laki.

- b. Langkah 4 melihat apakah internal lembaga/budaya organisasi menyumbang terhadap terjadinya isu gender, misalnya: produk hukum, pemahaman personil unit kerja tentang gender, *political will* dari pengambil kebijakan (berkaitan dengan prioritas program, dan anggaran)
- c. Langkah 5 melihat dan menganalisis apakah (a) pelaksana program tidak peka terhadap kondisi isu gender di masyarakat yang jadi target program; dan (b) kondisi masyarakat sasaran (target group) masih belum kondusif (patriakhi, stereotype, dan isu gender lainnya).
- d. Langkah 6 Setelah menemukenali isu gender (melalui Langkah 2 sampai dengan Langkah 5) dan mengaitkan dengan tujuan semula maka dilakukan perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
- e. Langkah 7 Setelah menemukenali isu gender (melalui Langkah 2 sampai dengan Langkah 5) dan mengacu pada reformulasi tujuan maka disusun rencana aksi yang responsif gender.
- f. Langkah 8, menetapkan base-line yaitu keadaan yang akan dipakai untuk mengukur kemajuan (progres) pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah responsif gender.
- g. Langkah 9 menetapkan indikator gender yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan bahwa kesenjangan gender telah menghilang atau berkurang. Memperlihatkan perubahan nilai dan perilaku pada para perencana kebijakan/program/kegiatan, di internal lembaga dan di masyarakat. Memperlihatkan perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, di internal lembaga, dan/atau di masyarakat.

Contoh penggunaan analisis gender dengan GAP.

Tabel 4.1 ANALISIS GAP

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis; identifikasi tujuan yang ingin dicapai	Data Pembuka	Isu Kesenjangan Gender			Kebijakan ke Depan		Monitoring Program/ Kegiatan	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	Sebab Kesenjangan eksternal	Reformulasi Kebijakan &	Tujuan Rencana Aksi	Base-line	Indikator Gender
		Mengacu pada data pembuka wawasan, dg memperhatikan ke-4 faktor kesenjangan (akses, kontrol, partisipasi, manfaat)	Fokus pada sebab internal lembaga (UU, peraturan/kebijakan/proses perencanaan, pemahaman unit kerja ttg gender)	Fokus pada sebab eksternal lembaga dan pada proses implementasi di masyarakat	Fokus pd bgm mereformulasi tujuan dg memperhitungkan isu dan kesenjangan gender yg teridentifikasi	Fokus pd macam kegiatan utk menghilangkan/mengurangi kesenjangan gender	Memilih keadaan yg akan dipakai utk mengukur progres	Tanda/ukuran utk memperlihatkan bahwa kesenjangan gender hilang/berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : Upaya Kesehatan Subprogram : Making Pregnancy Saver Rumusan : Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan mendekatkan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kematian Ibu tinggi • Unmet need KB tinggi • Antenatal Care rendah • Kehamilan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan kurang karena keputusan untuk memanfaatkan pelayanan ada di tangan suami/kelu 	Kegiatan penyuluhan dan pelayanan kehamilan di Posyandu hanya disediakan untuk perempuan. Hal ini menyebabkan pengetahuan dan pemahaman	Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa pertolongan kehamilan dan persalinan oleh dukun lebih menguntungkan daripada oleh bidan atau tenaga kesehatan	Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan mendekatkan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2014 diharapkan cakupan pelayanan	Meningkatkan KIE kepada masyarakat tentang kehamilan dan persalinan risiko tinggi termasuk kepada lakilaki/suami.	Tingkat kepesertaan laki-laki dalam pengaturan kehamilan melalui KB pada tahun 2002 hanya 2 %	Tingkat kepesertaan laki-laki dan perempuan dalam pengaturan kehamilan melalui KB (pada tahun tertentu setelah 10 (AKI) dengan mendekatkan pelayanan

<p>kesehatan maternal yang berkualitas kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2004 diharapkan cakupan pelayanan antenatal meningkat menjadi 90 %, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75 %, cakupan pelayanan postnatal meningkat menjadi 90 %,</p>	<p>kondisi 4 T tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komplikasi obstetri yang ditangani rendah • Pengetahuan laki-laki tentang kehamilan dan persalinan risiko tinggi rendah 	<p>rg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses laki-laki terhadap informasi tentang kehamilan dan persalinan kurang, termasuk yang risiko tinggi. 	<p>laki-laki tentang kehamilan risiko tinggi, dan perannya dalam mendampingi isterinya yang kehamilannya berisiko tinggi juga kurang sekali.</p>	<p>antenatal meningkat menjadi 90 %, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75 %, cakupan pelayanan postnatal meningkat menjadi 90 %, dengan lebih meningkatkan keterlibatan laki-laki/suami</p>	<p>kesehatan maternal yang berkualitas kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2004 diharapkan cakupan pelayanan antenatal meningkat menjadi 90 %, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75 %, cakupan pelayanan postnatal meningkat menjadi 90 %, Antenatal Care rendah 4. Kehamilan dengan kondisi 4 T tinggi 5. Komplikasi obstetri yang ditangani rendah 6. Pengetahuan laki-laki</p>
---	--	--	--	---	---

tentang kehamilan dan persalinan risiko tinggi rendah memanfaatkan pelayanan ada di tangan suami/keluarga. Akses laki-laki terhadap informasi tentang kehamilan dan persalinan kurang, termasuk yang risiko tinggi perempuan. Hal ini menyebabkan pengetahuan dan pemahaman laki-laki tentang kehamilan risiko tinggi, dan perannya dalam mendampingi isterinya yang kehamilannya berisiko tinggi juga kurang sekali. dukun lebih

menguntungkan daripada oleh bidan atau tenaga kesehatan kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2004 diharapkan cakupan pelayanan antenatal meningkat menjadi 90 %, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75 %, cakupan pelayanan postnatal meningkat menjadi 90 %, dengan lebih meningkatkan keterlibatan laki - laki/suami dilaksanak

Selain model sebagaimana tersebut diatas, dapat pula dengan model sebagai berikut :

1. Tuliskan nama SKPD, Program dan Kegiatan. Lakukan penelaahan terhadap tujuan dari sebuah program, apakah terformulasi secara jelas bahwa hasilnya ditujukan bagi manfaat laki-laki dan perempuan;
2. Melakukan identifikasi dan analisis atas data yang ada. Langkah ini dilakukan melalui penyajian data yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin dan data kualitatif untuk membuka wawasan dan melihat kesenjangan yang terjadi.
3. Melakukan analisis untuk mengetahui adanya kesenjangan dengan menggunakan empat unsur yang dipercayai sebagai faktor-faktor penyebab kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat), yaitu :
 - a. **Akses:** apakah perencanaan pembangunan sudah mempertimbangkan untuk memberikan akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
 - b. **Partisipasi:** apakah keikutsertaan/suara masyarakat, terutama kelompok perempuan atau laki-laki (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan/ terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.
 - c. **Kontrol:** apakah perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol (penguasaan) yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit, dan sumber daya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki.
 - d. **Manfaat:** apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan utk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki - laki.
4. Temu kenali unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab kesenjangan gender yang disebabkan dan berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya,

kesempatan berperan dalam mengambil keputusan, dan perbedaan dalam mendapatkan manfaat program, yaitu :

- a. Temu kenali isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut?
- b. Temu kenali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang focus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya. Analisis ini diharapkan dapat menemukan bentuk-bentuk kesenjangan gender menyangkut berbagai bentuk, seperti beban ganda, stereotipe, kekerasan berbasis gender, marginalisasi, dan subordinasi.
- c. Merumuskan kembali tujuan program/kegiatan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan, sehingga mendapatkan tujuan/sasaran program baru yang responsif gender;
- d. Susun kembali rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai hasil analisis;
- e. Rumuskan indikator responsif gender sebagai piranti untuk monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang dikembangkan, dengan membuat indikator pengukuran hasil output (keluaran) dan outcome (hasil) secara kuantitatif.

Matrik Lembar Kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*

BARIS 1	SKPD		
		Program	
		Kegiatan	
		Tujuan Kegiatan	
BARIS 2		Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	
BARIS 3	Isu Gender	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)	Akses : Kontrol /Kewenangan : Partisipasi : Manfaat :
BARIS 4	Faktor Penyebab	Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD) Sebab Kesenjangan Eksternal	
BARIS 5		Tujuan Responsif Gender	
BARIS 6		Rencana Aksi	
BARIS 7	Pengukuran Hasil	Output	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja • Target Kinerja
		Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja • Target Kinerja
		Dampak	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja • Target Kinerja

C. Integrasi Gender Dalam Dokumen Perencanaan

1. Integrasi Gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa RPJMD memuat:

- a. visi, misi, dan program kepala daerah;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;

- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Integrasi gender dalam RPJMD dapat dilakukan dengan pola pikir penyusunan rancangan awal yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Struktur RPJMD Responsif Gender

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Data dan Informasi • Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah 	Pendahuluan : Gambaran Umum Kondisi Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan re-gulasi PUG ke dalam dasar hu-kum penyusunan RPJMD. • Memasukan data kesenjangan yang menggambarkan aspek demografi, kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing. • Analisis gambaran umum menggambarkan kesenjangan gender tiap urusan.
Analisis Pengelolaan Ke-uangan Daerah serta Ke-rangka Pendanaan	Gambaran pe-ngelolaan ke-uangan daerah serta kerangka pendanaan.	Memasukan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah.

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.	Analisis isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.	Memasukkan isu ke-senjangan dan ke-tidakadilan gender melalui dimensi : akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat dalam perumusan masalah, termasuk faktor penyebabnya, menjadi isu strategis.
Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Isu-isu Strategis.	Memasukkan isu gender sebagai isu strategis yang ada di RPJMD
Perumusan Penjelasan Visi, Misi	Visi dan misi.	Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ke-tidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.
<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan • Perumusan Kebijakan Umum dan Program Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi dan arah kebijakan. • Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan responsif gender; • Merumuskan kebijakan umum responsive gender; • Menentukan program yang responsive gender.
Perumusan Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Beserta Kebutuhan Pendanaan	Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Penetapan Indikator Kinerja Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan pagu indikatif program termasuk untuk program responsif gender; • Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpisah berupa outcome (hasil) dari setiap program sesuai hasil GAP.

2. Integrasi Gender dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Integrasi Gender dalam Renstra SKPD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Integrasi gender dalam Renstra SKPD dengan menggunakan metoda GAP dapat mengikuti struktur Renstra SKPD sebagaimana tabel berikut :

Integrasi Gender dalam Dokumen Renstra SKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender
Pengolahan Data dan In-formasi	Gambaran Umum Kondisi Pelayanan SKPD	Memasukan data kesenjangan terpi-lah gender berdasar-kan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemam-puan yang menjadi fakta dalam pelaya-nan SKPD.
<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Gambaran Pelayanan SKPD • Analisis Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD : 	Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	Memasukan faktor penyebab kesen-jangan dan ketidak-adilan gender yang merupakan akar persoalan ketidak-adilan gender dalam pelayanan SKPD se-bagai isu strategis.
Perumusan Penjelasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD	Visi, Misi, Tu-juan dan Sa-saran	Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenja-ngan dan ketidak-adilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan
Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan dan Program	Memasukan renca-na aksi responsif gender dengan tujuan akhir men-capai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang di-analisis.
Perumusan Rencana Kegiat-an, Indikator Kinerja, Ke-lompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	Perumusan Rencana Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan	Memasukan ukuran kuantitatif maupun kualitatif berupa <i>output</i> dari setiap rencana aksi hasil analisis gender dan <i>outcome</i> (hasil atas pengaruh adanya <i>output</i>) sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja pe-layanan yang meng-hapuskan kesen-jangan dan

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender
	indikatif	ketidak-adilan gender.

3. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) SKPD

Integrasi gender dalam RKPD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Integrasi Gender dalam Dokumen RKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPKD	Struktur RPKD	Langkah Integrasi Gender
<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Data dan Informasi : • Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah • Evaluasi Kinerja Tahun Lalu • Analisis Masalah Pem-bangunan : 	Evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun lalu.	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah, serta data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun Lalu; • Memasukkan Kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya, baik internal dan eksternal berdasarkan data kesenjangan capaian kinerja RPKD tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan.
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah	Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan	Memasukan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam PAD, apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.
<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Prioritas dan 		Memasukan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPKD	Struktur RPKD	Langkah Integrasi Gender
Sasaran Pembangunan, berisi: <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Program Prioritas dan Pagu Indikatif 		mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang di-analisis.

4. Integrasi Gender dalam Renja SKPD

Integrasi gender dalam Renja SKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Renja SKPD dapat diikuti tabel sebagai berikut :

Integrasi Gender dalam Dokumen RENJA SKPD

Tahapan Penyusunan Renja	Struktur Renja	Langkah Integrasi Gender
<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Penyusunan Renja SKPD • Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD • Pelaksanaan Forum SKPD 	BAB I. PENDAHULUAN	Data pilah
	BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	Hasil Evaluasi pelaksanaan PPRG
	BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	Tujuan dan sasaran responsif gender
	BAB IV. PENUTUP	

5. Integrasi Gender dalam Musrenbang

a. Isu Strategis

Mengintegrasikan isu-isu gender terkait akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada sektor atau urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD pada GAP dalam rumusan isu-isu strategis pada musrenbang.

b. Langkah Integrasi yang Dilakukan Mencakup Perbaikan-Perbaikan pada Level Substantif pada pendekatan dan kualitas deliberasi dalam proses musrenbang, antara lain :

- 1) Memberi penghargaan yang sama antara isu yang dilontarkan laki-laki dan perempuan;
- 2) Memberi informasi tindak lanjut yang memadai atas usulan baik laki-laki maupun perempuan.

c. Langkah Integrasi yang Lain Mencakup Perbaikan pada Level Teknis yang memungkinkan keterlibatan baik perempuan maupun laki-laki di dalam proses musrenbang, antara lain :

- 1) Memastikan distribusi undangan;
- 2) *Setting* tempat dan pemilihan waktu yang memungkinkan keterlibatan perempuan dan laki-laki.

D. Penganggaran Responsif Gender

1. Konsep Anggaran Responsif Gender (ARG)

ARG adalah anggaran yang memberi/ mengakomodasi terhadap 2 hal, yaitu : (1) Keadilan bagi laki laki dan perempuan (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses dan manfaat dari program pembangunan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber sumber daya yang tersedia; (2) Kesetaraan bagi laki laki dan perempuan, terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, tetapi lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan dimaksud dapat berupa proses maupun

dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. Bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap laki laki dan perempuan, yang kemudian dianalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan laki laki atau kebutuhan perempuan secara memadai.

2. Karakteristik ARG

Menurut *United Nation Development Fund for Women* (UNIFEM), untuk dapat disebut sebagai anggaran responsif gender harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau perempuan;
- b. Fokus pada kesetaraan gender dan PUG dalam semua aspek penganggaran baik di tingkat nasional maupun lokal;
- c. Meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi stakeholder perempuan;
- d. Monitoring dan evaluasi belanja pemerintah dilakukan dengan responsif gender;
- e. Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber-sumber untuk mencapai kesetaraan gender dan pengembangan SDM;
- f. Menekankan pada prioritas daripada meningkatkan keseluruhan belanja pemerintah;
- g. Melakukan reorientasi dari program-program dalam sektor-sektor daripada menambah angka pada sektor-sektor khusus.

3. Tujuan ARG

- a. Meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki;
- c. Menghapuskan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

4. Manfaat ARG

a. Manfaat Bagi Pemerintah :

- 1) Sebagai instrumen pemerintah untuk melaksanakan komitmennya dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana telah disepakati secara international;
- 2) Fungsi anggaran selain sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi pemerataan;
- 3) Dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh pemerintah berpengaruh terhadap kesetaraan gender;
- 4) Gap/kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender (laki-laki maupun perempuan);
- 5) Memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal dan tidak beruntung terhadap alokasi anggaran;
- 6) Terwujudnya keseimbangan dan sustainable dalam pembangunan serta semakin meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

b. Manfaat Bagi Masyarakat :

- 1) Menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi, ketidakefisienan dan korupsi anggaran, serta mengajukan
- 2) alternatif kebijakan baru untuk keadilan bagi perempuan dan laki-laki;
- 3) Mengakui kebutuhan masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang paling miskin dan tidak berdaya dalam pembangunan;
- 4) Memperkuat advokasi dalam perubahan anggaran dan inisiatif pemantauan pelaksanaan anggaran untuk warga Negara.

5. Integrasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam Anggaran Kinerja

- a. ARG tidak bisa berjalan sendiri, oleh karenanya inisiatif ARG harus diselaraskan dalam framework penganggaran berbasis kinerja;
- b. Penganggaran berbasis kinerja di Indonesia akan terus diimplementasikan, sehingga memberi peluang besar bagi pendekatan dan *tools* ARG untuk memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja;
- c. Dalam kerangka anggaran kinerja, ARG memiliki peran penting karena keberadaan informasi gender dan data pilah memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran kinerja, yang disebabkan data pilah memiliki dua peran, yaitu :
 - 1) Mengidentifikasi ketidaksamaan kondisi diantara kelompok penerima layanan;
 - 2) Menegaskan perbedaan dampak dari kebijakan anggaran di antara anggota kelompok masyarakat yang berbeda.

Kriteria kinerja, yang mendasari anggaran berbasis kinerja terdiri atas 3E, yaitu *economy*, *efficiency* dan *effectiveness*. Deskripsi dari ketiga kriteria tersebut adalah :

6. Prinsip Anggaran Responsif Gender

- a. ARG bukan merupakan anggaran yang terpisah untuk laki laki dan perempuan;
- b. ARG sebagai pola anggaran yang menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki laki dan perempuan;
- c. ARG bukanlah dasar yang valid untuk memintakan tambahan alokasi anggaran;
- d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususnya untuk satu jenis kelamin;
- e. ARG tidak dapat diartikan pada pembagian alokasi dana 50% untuk laki laki dan 50 % untuk perempuan;
- f. Tidak semua program dan kegiatan mendapatkan koreksi agar menjadi responsif gender (ada kegiatan yang netral gender).

7. Kategori Anggaran Responsif Gender

ARG, dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. **Gender Spesific Expendi-ture** atau **anggaran khusus target gender**, yaitu anggaran yang menyasar kelompok gender tertentu, diperuntukan guna memenuhi kebutuhan standar dasar khusus laki laki dan perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki laki berdasarkan hasil analisis gender. Misalnya : anggaran untuk pelatihan ketrampilan usaha bagi janda miskin, atau penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan, anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin.
- b. **Affirmative Action Expenditure** atau **anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan**, yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik. Misalnya : anggaran pendidikan untuk staf perempuan, atau perumusan ulang *job description* jabatan di struktur pemerintahan dengan menghitung kondisi dan kebutuhan perempuan.
- c. **Mainstream Expenditure** atau **anggaran yang mengarusutama pada semua bidang pembangunan**. Misalnya : pembangunan jembatan penyeberangan yang aman bagi perempuan, pembangunan MCK terpisah untuk laki-laki dan perempuan dengan menghitung peran gender yang ada, beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki.



E. Instrumen Anggaran Responsif Gender

1. Pengertian Pernyataan Anggaran Gender (PAG)/Gender Budget Statement (GBS)

Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Penyusunan dokumen GBS pada tingkat *output* harus sudah melalui analisis gender dengan menggunakan alat analisis gender (antara lain *Gender Analysis Pathway* (GAP)).

GBS yang menerangkan output kegiatan yang responsif gender, merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (*Terms of Reference/TOR*). Kerangka Acuan Kegiatan/TOR dari suatu *output* kegiatan harus menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan (relevansi) komponen-komponen inputnya terhadap output yang dihasilkan.

2. Tahapan Penyusunan PAG

a. Tahap Analisis Situasi

- 1) Menyajikan data terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan gender;
- 2) Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;
- 3) Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan (gunakan kriteria akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk mencari isu-isu gender);
- 4) Lakukan analisis sebab akibat untuk mencari penyebab terjadinya kesenjangan gender berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin.

b. Tahap Penyusunan Kegiatan

- 1) Tuliskan nama kegiatan, sedapat mungkin kegiatan telah dilakukan analisis situasi;
- 2) Kegiatan harus sesuai yang tertulis dalam GAP;

3) Komponen kegiatan (ambil dari rencana aksi pada GAP).

c. Tahap Penyusunan Indikator Kinerja

- 1) Langkah 1 :Menetapkan Jumlah Input.
 - a) Tuliskan jumlah anggaran kegiatan;
 - b) Tuliskan komponen input;
 - c) Lakukan analisis, apakah alokasi anggaran kegiatan wajar dan rasional.
- 2) Langkah 2 : Merumuskan Indikator Keluaran.
 - a) Tuliskan indikator keluaran (*output*) kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi;
 - b) Lakukan analisis, apakah alokasi sumberdaya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan untuk mengurangi/ menghilangkan kesenjangan gender (dampak jangka pendek/menengah).
- 3) Langkah 3 : Merumuskan Indikator Hasil
 - a) Tuliskan indikator hasil yang realistis sesuai rumusan tujuan (ambil tujuan langkah dalam GAP);
 - b) Tentukan siapa target penerima manfaat (perempuan dan laki-laki);
 - c) Tuliskan indikator manfaat;
 - d) Tuliskan perkiraan dampak kegiatan;
 - e) Lakukan analisis, apakah akan terjadi perubahan perilaku dan perubahan relasi gender dalam jangka menengah dan panjang.

KOP SKPD

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD :
TAHUN ANGGARAN :

PROGRAM				
KEGIATAN				
KODE REKENING				
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan			
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan 1			
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Anggaran</i>			
	<i>SDM</i>			
	<i>Peralatan dan Mesin</i>			
OUTPUT	<i>Indikator Kinerja:</i>			
	<i>Target Kinerja:</i>			
OUTCOMES	<i>Indikator Kinerja:</i>			
	<i>Target Kinerja:</i>			
Semarang,				
KEPALA SKPD				
<div style="border-top: 1px solid black; width: 100%; margin: 0 auto;"></div>				
PANGKAT				
NIP				
Keterangan :				
Tanggal pembahasan :				
Catatan hasil pembahasan:				
1.				
2.				
3.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				
2.				

Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPA

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Responsif Gender

Isi KUA yaitu :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Kerangka Ekonomi Makro
- c. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD)
- d. Bab V Penutup

2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Responsif Gender

Susunan PPAS sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
- BAB III : Prioritas Belanja Daerah.
- BAB IV : Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan.
- BAB V : Rencana Pembiayaan Daerah.
- BAB VI : Penutup.

Keterangan :

- Proses penyusunan KUA-PPAS menentukan alokasi untuk periode satu tahun melalui kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD;
- GBS yang sudah dipersiapkan sejak penyusunan KUA-PPAS, dapat menjadi dasar mengapa program/kegiatan diperlukan;
- Kejelasan terhadap alasan mengapa program/kegiatan tersebut diperlukan menjadi kekuatan bagi eksekutif untuk melakukan negosiasi dengan DPRD dalam mencapai persetujuan tentang pengalokasian anggaran;
- Disepakatinya pengalokasian anggaran bagi program/kegiatan dalam dokumen KUA-PPAS akan menjadi dasar kuat dalam

penyusunan RKA-SKPD yang substansinya harus secara konsisten mengacu pada GBS.

F. RKA SKPD

1. Merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
2. Disesuaikan dari RKA setelah penetapan APBD;
3. Cek kembali rumusan indikator : Apakah rumusan indikator realistis bilamana terjadi pengurangan atau perubahan jumlah anggaran untuk satu kegiatan tertentu dari proses penetapan APBD.

Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Dokumen RKA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-SKPD 2.2.1			
Provinsi/Kab/Kota:					
Tahun Anggaran:					
Urusan pemerintahan:					
Organisasi:					
Program:					
Kegiatan:					
Lokasi Kegiatan:					
Jumlah tahun n-1	Rp				
Jumlah tahun n	Rp				
Jumlah tahun n+1	Rp				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian program					
Masukan					
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)
x.x.x.xx.xx					
x.x.x.xx.xx					
x.x.x.xx.xx					
Jumlah					

Kesesuaian program dan kegiatan dengan Renja SKPD

Apakah kegiatan spesifik, afirmasi, dan peningkatan kapasitas ataukah kegiatan secara umum?

Mengecek konsistensi dan indikator responsif gender dengan kerangka kinerja logis

Lokasi kegiatan keterlibatan laki-laki dan perempuan, wilayah dengan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus

Sejauh mana keterlibatan perempuan dan kelompok rentan? Perhatikan juga kasus seperti rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program KB.

BAB V

PENUTUP

RPJMN 2015-2019 menjelaskan mengenai strategi yang digunakan dalam percepatan implementasi PUG. *Pertama*, peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah. *Kedua* Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah. *Ketiga* peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

Beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam rangka mengimplementasikan PUG adalah : 1) dukungan politis dari pengambil keputusan, 2) ketersediaan lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG di daerah, 3) kapasitas SDM dalam rangka implementasi PUG, 4) ketersediaan data gender, 5) penerapan analisis gender dan integrasi gender dalam perencanaan penganggaran dan 5) dukungan anggaran.

Sistem Data Gender Kota Bekasi Tahun 2014 merupakan langkah tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Data Pilah Gender disusun dengan mengacu pada Indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Data Pilah Gender ini disusun sebagai pedoman bagi perencana di masing-masing SKPD guna mendukung proses pembangunan yang responsive gender. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, data pilah gender dapat berguna untuk,

Sebagai bahan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau disparitas kondisi laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif dan responsif terhadap masalah, kebutuhan, dan pengalaman dari masing-masing jenis kelamin (Permeneg PP No. 6 Tahun 2009). Perangkat

Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten untuk menentukan intervensi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.